



**PENGARUH PROFITABILITAS, DAN *LEVERAGE* TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR
INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2013-2017**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Erlita Nurwulan

022114105

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
OKTOBER 2018**

**PENGARUH PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Erlita Nurwulan
022114105

Dekan Fakultas Ekonomi



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak.,
MBA., CMA., CCSA., CA.,
CSEP., QIA.)

**PENGARUH PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017**

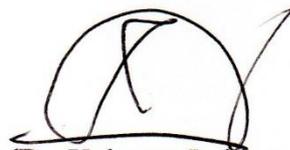
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Sabtu, Tanggal : 20 / Oktober / 2018

Erlita Nurwulan
022114105

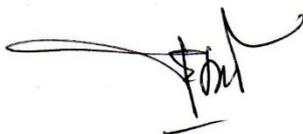
Menyetujui,

Ketua Sidang Penguji



(Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing
Pembimbing



(Joko Supriyanto, Ak., MAk., CFr.A, CA)

Anggota Komisi



(Haqi Fadillah S.E., M.Ak.)

ABSTRAK

Erlita Nurwulan, npm 022114105, akuntansi, akuntansi perpajakan. Pengaruh Profitabilitas, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. Dibimbing oleh Joko Supriyanto dan Haqi Fadillah. 2018.

Perusahaan-perusahaan yang berdiri dan mengembangkan usahanya di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan hal yang ingin dihindari karena dianggap beban yang dapat mengurangi laba bersih dari suatu perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan tax planning atau dengan melakukan agresivitas pajak. Nilai rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) pada 10 perusahaan sektor industri barang konsumsi berada dibawah rata-rata 0,025 atau < 25 persen. Nilai *effective tax rate* (ETR) dibawah rata-rata mengindikasikan bahwa adanya upaya melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *profitabilitas* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diprosikan dengan *effective tax rate* (ETR). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *profitabilitas* yang di prosikan dengan *net profit margin* (NPM) dan *leverage* yang diprosikan dengan *debt to asset ratio* (DAR).

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 44 perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *pusposive sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 21 perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi berdasarkan kriteria tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *Profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan secara simultan *Profitabilitas* dan *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Karena masih adanya sejumlah variabel lain yang belum digunakan dan penelitian ini hanya dilakukan selama 5 tahun maka penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan serta menambahkan variabel lain yang erat kaitannya dengan agresivitas pajak agar agresivitas pajak dapat dijelaskan dengan lebih baik.

Kata kunci : Agresivitas Pajak, *Profitabilitas* dan *Leverage*.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurahkan kepada jungjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman.

Penulis sangat bersyukur karena berkat rahmat dan ridha-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor pada Program Studi Akuntansi.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pakuan, Bogor.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, MM., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Bapak Joko Supriyanto, Ak., MAk., CFr.A, CA., selaku Ketua Komisi Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
6. Bapak Haqi Fadillah, SE., M.Ak., selaku Komisi Pembimbing 2, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
7. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
8. Kepada Kedua Orang Tua saya Tercinta yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungan baik moril maupun material, motivasi serta bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya proposal penelitian ini.
9. Adik saya Tercinta terimakasih atas doa dan dukungan semangatnya sehingga dapat terselesaikannya proposal penelitian ini.

10. Sahabat-sahabat tersayang F54 (cici, kiki, lina, teguh, abdur, prabu, ikhsan, dan tama), sahabat SMA (elva, jannah, dan maya), sahabat sejak smp (riki dan siti daulay) yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan kelas C dan D Akuntansi angkatan 2014 yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan bimbingan terutama (palupi, tinah, delam, citra, shinta, milah, windi, tresna, hari, rizqi, reza) yang telah memberikan semangat kepada penulis.
13. Serta teman-teman yang lain yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan semua pihak yang telah memberikan doa dan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT dan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa isi proposal penelitian ini jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis dalam penulisan proposal penelitian ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, atas perhatian dan masukan, penulis ucapkan terimakasih.

Bogor, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Maksud Penelitian	8
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritik.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktik	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Agensi	9
2.2 Pajak	10
2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	11
2.2.2 Objek Pajak Penghasilan	13
2.3 Agresivitas Pajak	14
2.3.1 Definisi Agresivitas Pajak	14
2.3.2 Tarif Pajak Efektif (<i>Effective Tax Rate</i>)	16
2.4 Profitabilitas.....	17
2.4.1 Definisi Rasio Profitabilitas	17
2.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas	18
2.4.3 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas	18
2.5 <i>Leverage</i>	19

2.5.1	Definisi Rasio <i>Leverage</i>	19
2.5.2	Tujuan dan Manfaat Rasio <i>Leverage</i>	20
2.5.3	Jenis-Jenis Rasio <i>Leverage</i>	20
2.6	Hubungan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	21
2.7	Hubungan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.....	22
2.8	Penelitian Sebelumnya.....	23
2.9	Kerangka Pemikiran	26
2.9.1	Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak	26
2.9.2	Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak	27
2.9.3	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak.....	27
2.10	Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	29
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	29
3.2.1	Objek Penelitian	29
3.2.2	Unit Analisis Penelitian.....	29
3.2.3	Lokasi Penelitian	29
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	29
3.4	Operasionalisasi Variabel	29
3.5	Metode Penarikan Sampel	30
3.6	Metode Pengumpulan Data	32
3.7	Metode Pengolahan/Analisis Data	32
3.7.1	Analisis Regresi Data Panel	32
3.7.2	Pemilihan Model	33
3.7.3	Uji Asumsi Klasik	34
3.7.4	Uji Hipotesis Penelitian.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN		
4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	37
4.1.1	Perbandingan Profitabilitas (NPM) dan <i>Leverage</i> (DAR) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi	39
4.2	Analisis Data.....	44
4.2.1	Pemilihan Model	45
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	46
4.2.3	Analisis Regresi Data Panel	48
4.2.4	Pengujian Hipotesis.....	50

4.3.Pembahasan	52
4.3.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi	52
4.3.2. Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi	52
4.3.3. Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi	52
4.4. Interpretasi Hasil Penelitian	53
4.4.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	53
4.4.2. Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.....	54
4.4.3. Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan...	55

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan.....	57
5.2.Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Sebelumnya	23
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	30
Tabel 3.2	Proses Seleksi Sampel	31
Tabel 3.3	Perusahaan Yang Menjadi Objek Penelitian	31
Tabel 3.4	Kriteria Autokorelasi <i>Durbin-Watson (DW)</i>	36
Tabel 4.1	Prosedur Pengambilan Sampel	37
Tabel 4.2	Daftar Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi	38
Tabel 4.3	Net Profit Margin (NPM) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013- 2017	39
Tabel 4.4	Debt to Asset Ratio (DAR) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013- 2017	41
Tabel 4.5	Effective tax rate (ETR) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013- 2017	43
Tabel 4.6	Uji Chow	45
Tabel 4.7	Uji Hausman	46
Tabel 4.8	Uji Normalitas	47
Tabel 4.9	Uji Heteroskedastisitas	47
Tabel 4.10	Uji Multikolinieritas	48
Tabel 4.11	Uji Autokotelasi	48
Tabel 4.12	Regresi Data Panel Model <i>Fixed Effect</i>	49
Tabel 4.13	Uji Statistik t	50
Tabel 4.14	Uji Statistik F	51
Tabel 4.15	Uji Koefisien Determinasi	52
Tabel 4.16	Ringkasan Hasil Penelitian	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penghindaran pajak	3
Gambar 2 Pertumbuhan <i>Profitabilitas</i> dan ETR periode 2013-2017	5
Gambar 3 Pertumbuhan <i>Leverage</i> dan ETR periode 2013-2017	6
Gambar 4 Kerangka Pemikiran	28

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Populasi Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi
- Lampiran 2 Daftar Sampel Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi
- Lampiran 3 Hasil Perhitungan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan-perusahaan yang berdiri dan mengembangkan usahanya di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan Negara. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan hal yang ingin dihindari karena dianggap beban yang dapat mengurangi laba bersih dari suatu perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak.

Pada saat ini penerapan tarif PPh badan di Indonesia mengalami perubahan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, menetapkan tarif tunggal untuk PPh badan sebesar 28 persen pada tahun 2009 dan 25 persen pada tahun 2010 dimana tarif yang digunakan sebelumnya adalah tarif progresif. Beberapa perusahaan seharusnya membayar pajak dengan tarif pajak efektif yang lebih tinggi/rendah dari tarif tersebut. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan perlakuan antara pencatatan akuntansi dan perpajakan. Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak. Hal tersebut mengakibatkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar.

Untuk mendorong pengusaha membayar pajak lebih giat lagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan fiskal memberikan intensif penurunan tarif pajak badan dalam negeri. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) menjelaskan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40 persen dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5 persen lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tidak hanya penurunan tarif, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun akan dikenakan tarif sebesar 1 persen. Pemerintah berharap dengan penurunan tarif pajak dan penyederhaan perhitungan pajak, diharapkan dapat menguntungkan pihak wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan juga ikut meningkat.

Namun upaya pemerintah untuk melakukan pengoptimalan dalam sektor pajak ini pun tetap menghadapi kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak adalah perusahaan melakukan *tax planning* atau dengan melakukan agresivitas pajak. Dimana agresivitas pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah

pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan, salah satunya adalah perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan *effective tax rate* (ETR).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah perlawanan dilakukan melalui berbagai cara yang masih dapat dibenarkan secara hukum, memanfaatkan celah dan kelemahan perundangan. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah perlawanan dilakukan melalui berbagai cara yang sebenarnya secara tegas dilarang oleh hukum, memanfaatkan lemahnya penegakan sanksi oleh aparat yang berwenang (Susyanti, dkk, 2015). Dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*) dapat dijadikan kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif (Ardyansah, 2014).

Tindakan agresivitas pajak dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak (Nugraha: 2015). Menurut Pohan (2018) mendefinisikan *aggressive tax planning* sebagai “*the situation where there is a reasonable probability that a particular tax return stance will not be upheld by an audit and subsequent legal challenge*”. Perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak jika semakin besar perusahaan mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Tarif pajak efektif perusahaan (*Effective Tax Rate/ETR*) sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan. Tarif pajak efektif juga digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi (Ardyansah, 2014).

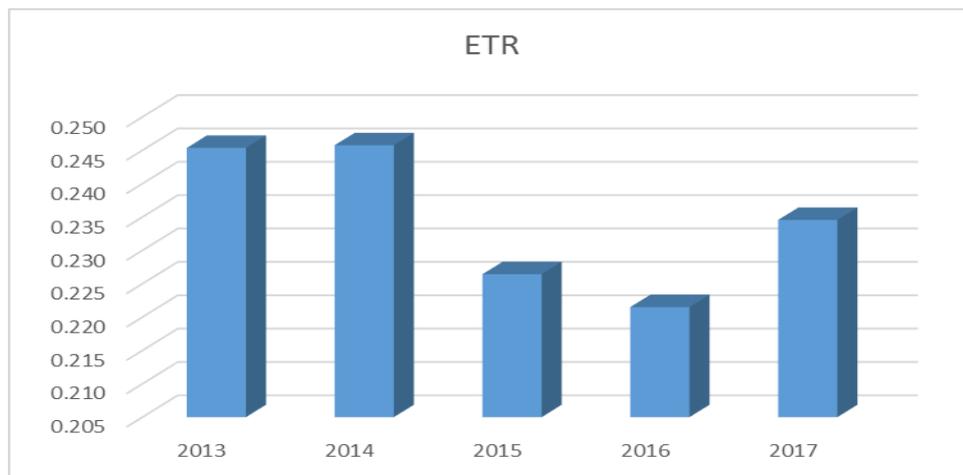
Fenomena penghindaran pajak ditahun 2013 adalah kasus sengketa pajak oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95 persen dan sisanya 5 persen dimiliki PT Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp32,9 triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp500 miliar. Sebelum dipisah margin laba sebelum pajak (*gross margin*) TAM mengalami peningkatan 11 persen hingga 14 persen per tahun. Namun setelah dipisah, *gross margin* TMMIN hanya sekitar 1,8 persen hingga 3 persen per tahun. Sedangkan di TAM, *gross margin* mencapai 3,8 persen hingga 5 persen. Jika *gross margin* digabung dengan TMMIN, persentasenya masih sebesar 7 persen. Artinya lebih rendah 7 persen dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14 persen. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi dibawah harga pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha (sumber: kontan, 26 Maret 2013, 18:05 WIB).

Selain itu, perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak, sebagai contoh beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus kasus penghindaran pajak oleh PT Coca Cola Indonesia. PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak

senilai Rp49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakkan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (sumber: kontan, 13 Juni 2014, 09:26 WIB).

Gambar 1.1

Penghindaran pajak (ETR) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017



(Sumber: data diolah penulis, www.idx.co.id, 2018)

Dari grafik di atas dapat diketahui nilai rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) dari 10 perusahaan yang diambil dari total 44 perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 berada di bawah tarif pajak normal (*statutory rate*) badan yang sebesar 25 persen. Apabila nilai *Effective Tax Rate* lebih rendah dibandingkan dengan *statutory rate* atau tarif pajak statutori maka perusahaan dinilai lebih agresif dalam aktifitas perencanaan pajaknya (Mayangsari, 2017). Untuk diketahui 25 persen adalah tarif pajak statutori yang berlaku dan ditetapkan sejak tahun 2010 seperti yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 2a.

Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya diduga disebabkan oleh *Profitabilitas* perusahaan. *Profitabilitas* merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. *Profitabilitas* sering dikaitkan dengan pengukuran kinerja manajemen, untuk mengetahui seberapa besar efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan *equity* yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba. Tinggi rendahnya *profitabilitas* seringkali merefleksikan keefektifan penggunaan aset. *Profitabilitas* suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung mengelola aset dan *equity* yang dikeluarkan dengan seefektif

mungkin sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba secara maksimal, agar tingkat *profitabilitas* perusahaan tetap baik. Semakin tinggi tingkat *profitabilitas* suatu perusahaan maka semakin baik pula kinerja manajemen dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga meningkat.

Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) sebagai tolak ukur dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Margin laba bersih (*Net Profit Margin*) atau yang biasa disebut NPM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih atas penjualan bersih. Nugraha (2015) menjelaskan, “Semakin tinggi tingkat *profitabilitas* perusahaan, maka pajak yang di bayar juga semakin tinggi. Penyebabnya adalah karena perusahaan yang memiliki *profitabilitas* besar akan terlihat dalam laporan keuangan dan tentunya memiliki beban pajak yang lebih besar yang harus dibayarkan”. Sedangkan penelitian Gemilang (2017) menyatakan, “Semakin tinggi tingkat *profitabilitas* perusahaan, maka membayar beban pajaknya rendah. Alasan yang memungkinkan adalah bahwa *profitable company* dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya untuk menurunkan ETR”. Karena terdapat perbedaan hasil penelitian yang ada, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini.

Dalam menjalankan kegiatannya, tentu saja setiap perusahaan membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah yang memadai. Dana ini tidak hanya dibutuhkan untuk membiayai jalannya kegiatan operasional perusahaan saja, melainkan juga untuk membiayai aktivitas investasi perusahaan. Seorang manajer keuangan yang andal dituntut untuk memiliki kepiawaian dalam mengelola keuangan perusahaan, termasuk kepiawaian dalam mempertimbangkan alternatif sumber pembiayaan perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan kombinasi sumber pembiayaan antara pinjaman dan modal, untuk menyiasati kebutuhan dana perusahaan. Kombinasi penggunaan dana ini dapat ditunjukkan melalui rasio solvabilitas atau rasio *leverage*. Rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Dalam hal ini perusahaan cenderung melakukan pertimbangan dalam memutuskan antara penggunaan dana dari pinjaman atau penggunaan dana dari modal sebagai alternatif sumber pembiayaan aset perusahaan, karena rasio *leverage* diperlukan untuk kepentingan analisis kredit atau analisis risiko keuangan. Penelitian mengenai pengaruh rasio *leverage* terhadap ETR telah banyak diteliti, namun terdapat perbedaan hasil penelitian dan juga teori yang digunakan.

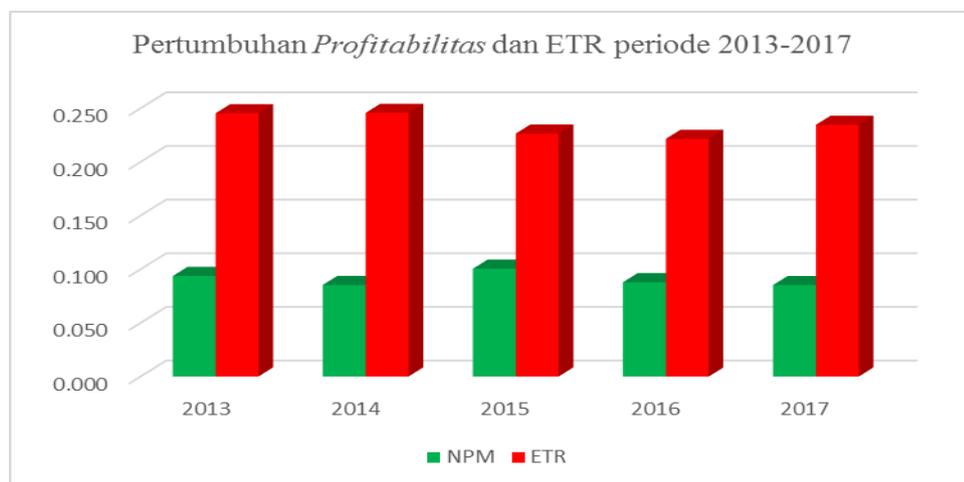
Untuk mengukur *leverage* menggunakan rasio yaitu Rasio Hutang Terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) sebagai tolak ukur dalam mempertimbangkan keputusan antara menggunakan dana dari pinjaman atau menggunakan dana dari modal sebagai alternatif sumber pembiayaan aset perusahaan. Rasio hutang terhadap aset atau biasa disebut DAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Menurut Sukmawati, dkk (2016) semakin besar hutang perusahaan maka semakin kecil beban pajak perusahaan, karena hutang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan

sebagai biaya (*tax deductible*) dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Sedangkan menurut Gemilang (2017) penelitian ini menggunakan teori Akuntansi Positif dengan hipotesis debt covenant, teori ini menjelaskan bahwa semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi beban pajak perusahaan, karena perusahaan menggunakan hutang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan diluar usaha perusahaan. Hal ini mengakibatkan laba yang diperoleh perusahaan meningkat dan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Dari beberapa penelitian menyatakan bahwa *Profitabilitas* dan *Leverage* dapat menaikkan agresivitas pajak atau dengan kata lain semakin tinggi *Profitabilitas* dan *Leverage* maka semakin rendah ETR (*Effective Tax Rate*). Dengan rendahnya tingkat ETR mencerminkan tingginya agresivitas pajak suatu perusahaan karena semakin rendah ETR maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak.

Gambar 1.2

Pertumbuhan *Profitabilitas* dan ETR Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017



(Sumber: data diolah penulis, www.idx.co.id, 2018)

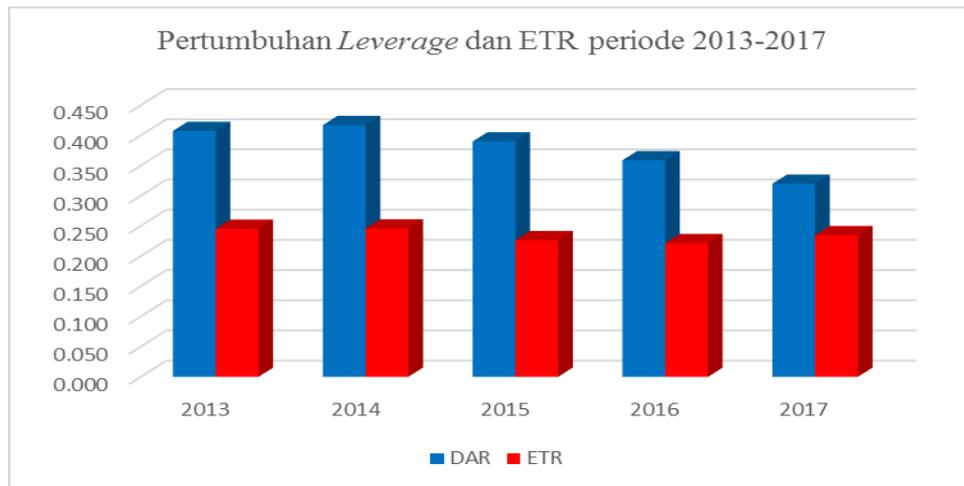
Dengan melihat grafik perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi tahun 2013-2017 di atas, peneliti melihat adanya gap yang terjadi pada tahun 2015 yaitu pada saat *Net Profit Margin* perusahaan mengalami kenaikan akan tetapi ETR perusahaan tersebut berada di bawah tarif pajak normal (*statutory rate*) badan yang sebesar 25 persen. Apabila nilai *Effective Tax Rate* lebih rendah dibandingkan dengan *statutory rate* atau tarif pajak statutori maka perusahaan dinilai lebih agresif dalam aktifitas perencanaan pajaknya (Mayangsari, 2017). Untuk diketahui 25 persen adalah tarif pajak statutori yang berlaku dan ditetapkan sejak tahun 2010 seperti yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 2a.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Gemilang (2017) yang menunjukkan bahwa variabel *profitabilitas* perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan semakin besar profitabilitas perusahaan maka perusahaan akan mengurangi tindakan agresivitas pajak karena perusahaan yang memiliki profitabilitas besar akan terlihat

dalam laporan keuangan dan memiliki beban pajak yang lebih besar yang dibayarkan.

Gambar 1.3

Pertumbuhan *Leverage* dan ETR Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017



(Sumber: data diolah penulis, www.idx.co.id, 2018)

Dengan melihat grafik perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi tahun 2013-2017 di atas, peneliti melihat adanya gap yang terjadi pada tahun 2014, yaitu pada saat *Debt to Asset Ratio* perusahaan mengalami kenaikan akan tetapi ETR perusahaan tersebut berada di bawah tarif pajak normal (*statutory rate*) badan yang sebesar 25 persen. Apabila nilai *Effective Tax Rate* lebih rendah dibandingkan dengan *statutory rate* atau tarif pajak statutori maka perusahaan dinilai lebih agresif dalam aktifitas perencanaan pajaknya (Mayangsari, 2017). Untuk diketahui 25 persen adalah tarif pajak statutori yang berlaku dan ditetapkan sejak tahun 2010 seperti yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 2a.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Gemilang (2017) yang menunjukkan bahwa variabel *leverage* perusahaan terbukti tidak berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap agresifitas pajak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi beban pajak perusahaan, karena perusahaan menggunakan hutang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan diluar usaha perusahaan. Hal ini mengakibatkan laba yang diperoleh perusahaan meningkat dan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Karena industri barang konsumsi merupakan salah satu industri yang mampu bertahan dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1998. Selain itu, industri barang konsumsi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan

industri barang konsumsi menyediakan produk-produk yang merupakan kebutuhan primer masyarakat, permintaan akan produk industri barang konsumsi akan cenderung stabil yang berdampak pada kemampuan laba yang optimal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gemilang (2017) menunjukkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, sedangkan likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dalam penelitian Nugraha (2015) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan, *profitabilitas*, dan *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Adanya tindakan perusahaan untuk melakukan *tax planning* atau agresivitas pajak dan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus dibayar tergantung dari besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya bertentangan dengan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba yang maksimal, karena pajak dianggap beban oleh perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara *tax planning* (perencanaan pajak) yang dilakukan perusahaan melalui *tax avoidance* (penghindaran pajak). Banyak kasus yang terkait dengan agresivitas pajak baik dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya praktik agresivitas pajak yang terdapat di dalam negeri yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT Coca Cola Indonesia. Penghindaran pajak disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya yaitu Profitabilitas dan *Leverage*. Profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan, karena semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. *Leverage* dapat digunakan untuk mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan, karena semakin tinggi leverage maka semakin rendah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan biaya bunga. Serta karena adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai agresivitas pajak perusahaan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *profitabilitas* yang diproksikan dengan *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2013-2017?
2. Apakah *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2013-2017?
3. Apakah *profitabilitas* yang diproksikan dengan *Net Profit Margin* (NPM) dan *leverage* yang di proksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2013-2017?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menguji serta menganalisis keterkaitan atau hubungan antara variabel-variabel penelitian *profitabilitas* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2013-2017, serta dapat menyimpulkan hasil penelitian mengenai bagaimana pengaruh variabel-variabel yang diteliti.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini antarlain:

1. Untuk menganalisis apakah *profitabilitas* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2013-2017.
2. Untuk menganalisis apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2013-2017.
3. Untuk menganalisis apakah *profitabilitas* dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2013-2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi perpajakan dan dapat menambah pemahaman yang lebih luas bagi penulis maupun pembaca mengenai pengaruh *profitabilitas* dan *leverage* perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi penulis selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap manajemen suatu perusahaan maupun pengguna laporan keuangan dalam menentukan perencanaan pajaknya. Selain itu penelitian ini diharapkan pula dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki kebijakan perpajakan dalam menghadapi agresivitas pajak baik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak pemberi kewenangan (*principal*) dengan pihak yang diberi kewenangan (*agent*) (Nugraha, 2015). Luayyi (2010) menyebutkan bahwa dalam teori agensi atau keagenan terdapat kontrak atau kesepakatan antara pemilik sumber daya dengan manajer untuk mengelola perusahaan dan mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga memungkinkan manajer melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut baik cara yang baik ataupun cara yang merugikan banyak pihak.

Teori agensi muncul ketika ada sebuah perjanjian hubungan kerja antara *principle* yang memiliki wewenang dengan *agent* atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan (Nugraha, 2015). Manajer (*agent*) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan (*principle*) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya (Ardyansyah, 2014).

Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja manajer. Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebihan, keputusan investasi suboptimal dan asimetris informasi. Asimetris informasi terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Nugraha, 2015).

Menurut Ardyansyah (2014) asimetris informasi antara manajer dan pemilik perusahaan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1. *Adverse Selection*

Adverse selection mengungkapkan adanya perbedaan informasi yang dimiliki pihak *principle* dengan pihak *agent*. Perbedaan informasi yang dimiliki dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang memiliki informasi lebih sedikit. Misalnya *agent* memanipulasi atau menyembunyikan informasi keadaan perusahaan kepada *principle*. Akibatnya *principle* merasa tidak yakin dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya jika dibandingkan antara informasi yang diberikan *agent* dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi *principle* dan perusahaan.

2. *Moral Hazard*

Moral hazard mengungkapkan adanya bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh *agent* yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang disepakati antara *principle* dan *agent*. Hal ini bisa disebabkan karena adanya kegiatan *agent* yang tidak sesuai dengan harapan *principle* sehingga *agent* dapat melakukan manipulasi atau

tindakan yang tidak sesuai dengan norma. *Moral hazard* biasanya dilakukan demi keuntungan pribadi bagi *agent*.

Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi *agent* untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil (Ardyansyah, 2014).

Terdapat beberapa cara untuk mengontrol tindakan *agent* terkait dengan kegiatan manajemen pajak yang dilakukan, yaitu dengan mengevaluasi hasil laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dibandingkan dengan tindakan agresivitas pajak yang mungkin dilakukan *agent* (Nugraha, 2015). Rasio yang digunakan adalah *profitabilitas* dan *leverage* yang dibandingkan ETR perusahaan yang didapat dari beban pajak dibanding laba sebelum pajak.

Sebuah perusahaan tergolong besar jika memiliki total aset yang besar pula. Total aset perusahaan dapat bertambah atau meningkat seiring dengan besarnya laba yang dihasilkan perusahaan (Nugraha, 2015). Total aset juga terus bertambah mengikuti semakin besarnya *liabilitas* dan *ekuitas* perusahaan karena mengharuskan adanya keseimbangan antara aset dengan *liabilitas* dan *ekuitas*. Semakin besar laba yang dihasilkan berarti semakin besar pula pendapatan kena pajak dan semakin besar pajak yang seharusnya dibayarkan namun bisa saja *agent* melakukan manipulasi sehingga harus dibandingkan dengan besarnya ETR perusahaan (Nugraha, 2015).

2.2 Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta yang menjadi subjek pajaknya adalah Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (Wahono, 2012)

Dalam buku perpajakan untuk praktisi dan akademisi (Susyanti, dkk, 2015) ciri-ciri yang ada dalam pengertian pajak tersebut adalah:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara.
2. Dipungut berdasarkan UU dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan.
3. Tanpa kontraprestasi secara langsung.

4. Dipungut oleh pemerintah pusat (Negara) maupun oleh pemerintah daerah (propinsi, kota/kabupaten)
5. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan demi kemakmuran masyarakat.

Dalam buku perpajakan untuk praktisi dan akademisi (Susyanti, dkk, 2015) hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak (fiscus) dan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak). Hukum pajak juga sering disebut hukum fiskal.

Hukum pajak dibedakan menjadi:

1. Hukum pajak materiil adalah peraturan yang mengatur tentang pajak yang sifatnya umum. Disebut juga hukum pajak umum (*Lex-Generalis*). Hukum pajak materiil ini wujudnya berupa undang-undang perpajakan, seperti: UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh, UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, dan lain sebagainya.
2. Hukum pajak formil adalah peraturan yang mengatur bagaimana hukum pajak materiil dilaksanakan. Hukum pajak formil juga disebut hukum pajak khusus atau hukum acara perpajakan (*Lex-Specialist*). Hukum pajak formil ini disebut juga Peraturan-Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Perpajakan yang berupa: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jendral Pajak, Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak, dan lain sebagainya.

Dalam ilmu hukum termasuk juga hukum pajak berlaku ketentuan yang menyatakan "*Lex-Specialist derogat Lex Generalis*" yang artinya hukum khusus bisa meniadakan hukum umum. Jadi hukum formil dalam kondisi tertentu bisa meniadakan hukum materiil.

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (Susyanti, dkk, 2015). Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang sudah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Undang-Undang PPh menganut asas Materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak (Mardiasmo, 2011).

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Dalam buku mengurus pajak itu mudah (Wahono, 2012) menyatakan: pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak yang mempunyai objek pajak

(penghasilan). Yang termasuk subjek pajak menurut Undang-Undang tentang pajak penghasilan adalah:

1. a. Orang Pribadi

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Yang termasuk Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi:

- a. Perseroan terbatas
- b. Perseroan komanditer, perseroan lainnya
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun
- d. Firma
- e. Kongsi
- f. Koperasi
- g. Dana pensiun
- h. Persekutuan
- i. Perkumpulan
- j. Yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis
- k. Lembaga
- l. Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana

3. Kewajiban perpajakan PPh Badan

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria (Mardiasmo, 2011):

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Obyek pajak adalah sasaran yang akan dikenakan pajak, dalam hal ini yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan (Hutomo, 2009).

Dalam buku perpajakan (Susyanti, dkk, 2015) me-nyatakan penghasilan yang termasuk objek pajak dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, yang berbunyi:

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam UU ini
2. Hadiah dari undian, atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premi, diskonto, dan imbalan karena jaminan atas pengembalian hutang

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
12. Ketentuan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia

2.3 Agresivitas Pajak

2.3.1 Definisi Agresivitas Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dalam Susyanti, dkk (2015), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri yang ada dalam pengertian pajak tersebut adalah:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara
2. Dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan.
3. Tanpa kontra prestasi secara langsung
4. Dipungut oleh pemerintah pusat (Negara) maupun oleh pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota)
5. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan demi kemakmuran masyarakat.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada Negara atas penghasilan yang diperoleh individu atau badan. Karena tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dinikmati oleh wajib pajak menyebabkan secara ekonomis perusahaan memandang pajak

sebagai unsur pengurangan laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali sehingga perusahaan menganggap pembayaran pajak sebagai beban. Menurut Susanti (2015) karena pembayaran pajak dianggap sebagai beban oleh perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan upaya untuk melakukan penghematan pajak atau laba yang optimal. Untuk menghindari berkurangnya kas yang tersedia, maka tindakan mengurangi pajak melalui aktivitas pajak yang agresif cenderung disukai oleh perusahaan dan pemegang saham menurut Susanti (2015).

Susanti (2015) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai segala tindakan yang dilakukan manajemen melalui perencanaan pajak untuk mengurangi laba kena pajak, baik dengan cara *tax avoidance* atau *tax evasion*. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah perlawanan dilakukan melalui berbagai cara yang masih dapat dibenarkan secara hukum, memanfaatkan celah dan kelemahan perundangan. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah perlawanan dilakukan melalui berbagai cara yang sebenarnya secara tegas dilarang oleh hukum, memanfaatkan lemahnya penegakan sanksi oleh aparat yang berwenang (Susyanti, dkk, 2015).

Menurut Murphy (2004) mendefinisikan *aggressive tax planning* sebagai “*the situation where there is a reasonable probability that a particular tax return stance will not be upheld by an audit and subsequent legal challenge.*” Hampir sama dengan pengertian itu, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2008) mendefinisikan *aggressive tax planning* sebagai “*planning involving a tax position that is tenable but has unintended and unexpected tax revenue consequences. Revenue bodies’ concerns relate to the risk that tax legislation can be misused to achieve results which were not foreseen by the legislators.*” Konsekuensinya, *aggressive tax planning* melibatkan transaksi atau pengaturan yang digunakan untuk meminimalkan atau mengurangi pajak karena kekurangan substansi ekonomi (*lack of economic substance*) dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang (Pohan, 2018).

Pohan (2018) menyebutkan bahwa di Australia, skema-skema yang dapat dikategorikan sebagai *aggressive tax planning* menurut Australian Taxation Office (ATO) adalah sebagai berikut:

1. Transaksi yang dibuat semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak. Dengan kata lain transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan bisnis, walaupun ada tujuan bisnisnya sangat tidak signifikan.
2. Berusaha mendapatkan fasilitas pajak yang sebenarnya fasilitas pajak tersebut tidak ditujukan kepada subjek pajak yang bersangkutan.
3. Membuat skema transaksi yang berputar-putar yang pada akhirnya transaksi tersebut akan kembali ke skema awal (*round-robin flow of funds*).
4. Penggelembungan nilai aset untuk mendapatkan biaya penyusutan yang besar dimasa yang akan datang.
5. Memanfaatkan suatu entitas usaha dimana penghasilan yang diterima oleh entitas usaha tersebut dikecualikan sebagai objek pajak.
6. Transaksi bisnis yang melibatkan Negara-negara yang dikategorikan *tax haven countries*,

Manfaat agresifitas pajak perusahaan adalah penghematan pengeluaran atas pajak sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik menjadi semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang. Sedangkan kerugian dari agresivitas pajak perusahaan adalah kemungkinan perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan. Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak perusahaan ini akan mengurangi pendapatan Negara dalam sektor pajak (Gemilang, 2017).

Agresivitas pajak dapat diukur dengan berbagai cara. Menurut Gemilang (2017) agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR), *cash effective tax rate* (CETR), *book-tax difference Manzon-Plesko* (BTD_MP), *book-tax difference desai-Dharmapala* (BTD_DD) dan *tax planning* (TAXPLAN). Lanis dan Richardson (2012) menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak dengan alasan beberapa penelitian sebelumnya banyak menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak. Semakin rendah nilai ETR mengindikasikan adanya agresivitas pajak dalam perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

Effective tax rate (ETR) digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al, 2009). Sedangkan menurut Ardyansyah (2014) *effective tax rate* (ETR) dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *effective tax rate* (ETR) merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Dari definisi tersebut *effective tax rate* (ETR) mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh.

2.3.2 Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*)

Menurut Mayasari, dkk (2017) Tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) adalah tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Sedangkan dalam Danis Ardyansah (2014) *Effective tax rate* (ETR) didefinisikan sebagai beban pajak penghasilan total dibagi dengan pendapatan sebelum pajak (PWC, 2011). Selain itu Dittmer (2011) mendefinisikan *effective tax rate* (ETR) sebagai rasio pajak yang dibayar untuk keuntungan sebelum pajak untuk suatu periode tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) adalah rasio pajak yang dibayar atas keuntungan perusahaan pada periode tertentu yang dihitung dengan membagi beban pajak penghasilan total dengan pendapatan sebelum pajak.

Ardyansah (2014) mengklasifikasikan *effective tax rate* (ETR) sebagai berikut:

1. *Average Effective Corporate Tax Rate*: biaya pajak tahun berjalan dibagi dengan penghasilan perusahaan yang sebenarnya (laba sebelum pajak).
2. *Average Affective Total Tax Rate*: besaran biaya pajak perusahaan ditambah pajak properti ditambah bunga atas pajak pribadi dan deviden, dibagi dengan pendapatan total modal.

3. *Marginal Effective Corporate Tax Wedge*: besaran tarif penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi marginal, dikurangi penghasilan riil perusahaan sebelum pajak.
4. *Marginal Effective Corporate Tax Rate*: pajak marginal efektif perusahaan dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan penghasilan setelah pajak (*tax exclusive rate*).
5. *Marginal Effective Total Tax Wedge*: penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam marginal investasi dikurangi penghasilan setelah pajak sebagai penghematan atas penghasilan.
6. *Marginal Effective Total Tax Rate*: total pajak marginal efektif dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan penghematan pajak penghasilan (*tax exclusive rate*) yang dilakukan perusahaan.

Effective tax rate semakin baik apabila nilai *effective tax rate* semakin rendah. Menurut Ardyansah (2014) *effective tax rate* dapat dihitung dari beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak dan tidak membedakan antara beban pajak kini dan beban pajak tangguhan sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

2.4 Profitabilitas

Profitabilitas ini sering dikaitkan dengan pengukuran kinerja manajemen, untuk mengetahui seberapa besar efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan equity yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba. Tinggi rendahnya *profitabilitas* seringkali merefleksikan keefektifan penggunaan aset.

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat *profitabilitas* yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri *profitabilitas* dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut.

2.4.1 Definisi Rasio Profitabilitas

Menurut Hery (2015) “Rasio *Profitabilitas* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal”

Menurut Harjito, dkk (2012) “Rasio *Profitabilitas* yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya”

Selain itu, menurut Hermanto, dkk (2015) “Rasio *Profitabilitas* adalah yang mengukur tingkat efektivitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dalam penjualan dan investasi perusahaan”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio *profitabilitas* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas

manajemen dalam mengelola perusahaan dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio *profitabilitas* memiliki banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, rasio *profitabilitas* tidak hanya berguna bagi perusahaan saja, melainkan berguna juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari rasio *profitabilitas* baik bagi pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, maupun para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perusahaan.

Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio *profitabilitas* secara keseluruhan menurut Hary (2015):

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

2.4.3 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Biasanya, penggunaan rasio *profitabilitas* disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio *profitabilitas* secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu untuk diketahui. Berikut adalah jenis-jenis rasio *profitabilitas* yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menurut Hery (2015):

1. Hasil Pengembalian Atas Aset (*Return On Assets*)
2. Hasil Pengembalian Atas Ekuitas (*Return On Equity*)
3. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)
4. Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)
5. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) sebagai tolak ukur dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Margin laba bersih (*Net Profit Margin*) atau yang biasa disebut NPM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap

penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan disini adalah laba operasional ditambah pendapatan ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lai-lain.

Semakin tinggi margin laba bersih/NPM berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin rendah margin laba bersih/NPM berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba bersih/NPM menurut Hery (2015):

$$\text{Margin Laba Bersih (NPM)} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{penjualan bersih}} \times 100\%$$

2.5 Leverage

Dalam menjalankan kegiatannya, tentu saja setiap perusahaan membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah yang memadai. Dana ini tidak hanya dibutuhkan untuk membiayai jalannya kegiatan operasional perusahaan saja, melainkan juga untuk membiayai aktivitas investasi perusahaan, seperti biaya untuk mengganti atau membeli tambahan peralatan dan mesin produksi yang baru, membuka kantor cabang baru, melakukan ekspansi bisnis, dan sebagainya. Seorang manajer keuangan yang andal dituntut untuk memiliki kepiawaian dalam mengelola keuangan perusahaan, termasuk kepiawaian dalam mempertimbangkan alternatif sumber pembiayaan perusahaan. Penting bagi manajer keuangan untuk menyiasati kebutuhan dana perusahaan dengan cara melakukan kombinasi sumber pembiayaan antara pinjaman dan modal. Kombinasi penggunaan dana ini dapat ditunjukkan lewat rasio solvabilitas atau rasio *leverage*. Rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang.

2.5.1 Definisi Rasio *Leverage*

Menurut Hery (2015) “Rasio Solvabilitas atau Rasio *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset”

Menurut Hermanto, dkk (2015) “Rasio *Leverage* adalah mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau dengan kata lain mengukur perbandingan antara dana yang disiapkan oleh pemilik dengan dana yang berasal dari pihak luar/ pihak kreditor”

Selain itu, menurut Harjito, dkk (2012) “Rasio *Leverage* yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang (pinjaman)”

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi asetnya, apakah lebih besar menggunakan dana pinjaman (hutang) atau menggunakan dana yang telah disiapkan oleh pemilik.

2.5.2 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Hasil perhitungan rasio solvabilitas atau *leverage* diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan antara penggunaan dana dari pinjaman atau penggunaan dana dari modal sebagai alternatif sumber pembiayaan aset perusahaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perhitungan ini perlu dilakukan dengan cermat, karena rasio *leverage* diperlukan untuk kepentingan analisis kredit atau analisis risiko keuangan.

Menurut Hery (2015) berikut adalah tujuan dan manfaat rasio *leverage* secara keseluruhan:

1. Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan.
2. Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan.
3. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala.
4. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang.
5. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal.
6. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang terhadap pembiayaan aset perusahaan.
7. Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan.
8. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan hutang kepada kreditor.
9. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham.
10. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan hutang.
11. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan hutang jangka panjang.
12. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak) dalam membayar bunga pinjaman.
13. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban.

2.5.3 Jenis-Jenis Rasio *Leverage*

Biasanya penggunaan rasio *leverage* disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio *leverage* secara keseluruhan maupun hanya sebagian saja dari jenis rasio *leverage* yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu untuk diketahui.

Menurut Hery (2015) berikut adalah jenis-jenis rasio *leverage* yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya:

1. Rasio Hutang Terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)
2. Rasio Hutang Terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)
3. Rasio Hutang Jangka Panjang Terhadap Modal (*Long Term Debt to Equity Ratio*)
4. Rasio Kelipatan Bunga Yang Dihasilkan (*Times Interest Earned Ratio*)
5. Rasio Laba Operasional Terhadap Kewajiban (*Operating Income to Liabilities Ratio*)

Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan Rasio Hutang Terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) sebagai tolak ukur dalam mempertimbangkan keputusan antara menggunakan dana dari pinjaman atau menggunakan dana dari modal sebagai alternatif sumber pembiayaan aset perusahaan. Rasio hutang terhadap aset atau biasa disebut DAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset.

Apabila besaran rasio hutang terhadap aset (DAR) adalah tinggi maka hal ini tentu saja akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditor karena dikhawatirkan bahwa perusahaan tidak mampu melunasi hutang-hutangnya dengan total aset yang dimilikinya. Sedangkan jika rasionya kecil menunjukkan bahwa sedikitnya aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang (dengan kata lain bahwa sebagian besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh modal). Membandingkan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan sejauh mana dana yang dipinjam telah digunakan untuk membeli aset. Rasio ini seringkali digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Semakin tinggi DAR maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat melunasi kewajibannya.

Menurut Hery (2015) berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio hutang:

$$\text{Rasio Utang terhadap Aset (DAR)} = \frac{\text{total hutang}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

2.6 Hubungan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Suatu kegiatan usaha (bisnis) yang dijalankan oleh perusahaan, tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik dan manajemen perusahaan. Tujuan tersebut merupakan keinginan pemilik dan manajemen suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang optimal atas usaha yang dijalanannya dan adanya hasil atas modal yang ditanamkan sehingga mampu memberikan tambahan modal dan kemakmuran bagi pemilik dan seluruh karyawannya (Kasmir, 2016).

Suatu perusahaan dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaannya baik, tercermin dalam laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan. Salah satu indikator dalam laporan keuangan yang mencerminkan kinerja perusahaan yang baik dapat dilihat

dari laba perusahaan. Dimana ketika laba perusahaan yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja perusahaan pada tahun tersebut cenderung baik. Laba perusahaan ini dipengaruhi oleh beban-beban pada tahun berjalan, semakin kecil beban-beban perusahaan pada tahun berjalan maka akan semakin besar laba perusahaan pada tahun tersebut. Salah satu beban yang penting dalam operasional perusahaan adalah beban pajak (Damanik, 2017). Setiap perusahaan berkeinginan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Namun perusahaan juga berkewajiban dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, agresivitas pajak atau tindakan meminimalkan beban pajak sering terjadi di perusahaan.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Gemilang (2017) menyebutkan bahwa hubungan antara *profitabilitas* dan ETR bersifat langsung dan signifikan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.

Dalam penelitian Gemilang (2017) sesuai dengan teori sebelumnya yang menyebutkan bahwa semakin besar *profitabilitas* maka semakin besar juga ETR maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar *profitabilitas* yang diperoleh perusahaan maka perusahaan akan mengurangi tindakan agresivitas pajak karena perusahaan yang memiliki *profitabilitas* besar akan terlihat dalam laporan keuangan dan tentunya memiliki beban pajak yang lebih besar yang harus dibayarkan.

2.7 Hubungan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan usaha (bisnis) tentu saja perusahaan membutuhkan dana dalam jumlah yang memadai. Dana ini tidak hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan saja melainkan juga membiayai aktivitas investasi perusahaan. Dalam memperoleh dana untuk kepentingan pembiayaan, perusahaan-perusahaan pada umumnya memiliki beberapa sumber alternatif, seperti dana yang dimiliki oleh pemilik (modal) maupun dana pinjaman. Penting bagi manajer keuangan untuk menyiasati kebutuhan dana perusahaan dengan cara melakukan kombinasi sumber pembiayaan antara pinjaman dan modal. Kombinasi penggunaan dana ini dapat ditunjukkan melalui rasio *leverage*.

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Dengan kata lain rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam rangka pemenuhan aset (Hery, 2015).

Ardyansyah (2014) menyebutkan bahwa perusahaan dengan jumlah hutang yang lebih banyak akan memiliki ETR yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat mengurangi pendapatan perusahaan sebelum pajak, dan tentunya akan mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar. Lanis dan Richardson (2007) juga menyebutkan hubungan yang negatif antara *leverage* dan ETR.

Dalam Gemilang (2017) menyatakan perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena perusahaan harus mempertahankan laba mereka karena terikat dengan kepentingan kreditur. Apabila perusahaan berusaha meningkatkan laba, maka beban pajak yang dibayarkan juga akan meningkat.

2.8 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini adalah replikasi atau pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan. Replikasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu dilakukan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan. Maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Dewi Nawang Gemilang (2017)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2013-2015)	Dependen: Agresivitas Pajak Perusahaan Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i>	<i>Profitabilitas</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan likuiditas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan
2	Novia Bani Nugraha (2015)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keluarga yang Terdaftar Di BEI selama Periode 2012-2013)	Dependen: Agresivitas Pajak Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan, <i>profitabilitas</i> , dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
3	Irawati Susanti (2015)	Pengaruh Agresivitas Pajak dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013	<p>Dependen: Kebijakan Hutang Perusahaan</p> <p>Independen: Agresivitas Pajak dan Kepemilikan Keluarga</p>	Agresivitas pajak yang diukur menggunakan perbedaan total laba akuntansi dan laba pajak memberikan pengaruh negatif terhadap kebijakan hutang perusahaan. Namun, agresivitas pajak yang diukur menggunakan perbedaan permanen laba akuntansi dan laba pajak menunjukkan pengaruh positif. Kepemilikan keluarga terbukti memberikan pengaruh positif terhadap tingkat hutang serta memperlemah hubungan antara agresivitas pajak dan kebijakan hutang
4	Danis Ardyansah (2014)	Pengaruh <i>Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen Terhadap <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI selama Periode 2010-2012)	<p>Dependen: <i>Effective Tax Rate (ETR)</i></p> <p>Independen: <i>Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen</p>	<i>Size</i> dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> . Sedangkan <i>leverage, profitability</i> dan <i>capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i>
5	Putri Mayasari, Rahmawati Dan Efi Susanti (2017)	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , dan <i>Leverage</i> Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2013-2016	<p>Dependen: Tarif Pajak Efektif</p> <p>Independen: <i>Profitabilitas</i>, dan <i>Leverage</i></p>	Secara simultan, variabel independen <i>Profitabilitas</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif. Sedangkan secara parsial dari dua variabel independen, yang berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif adalah <i>Profitabilitas</i> , sedangkan variabel independen <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
6	Febry C. Damanik (2017)	Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> dengan Dewan Komisaris Sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015	<p>Dependen: Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p>Independen: Agresivitas Pajak</p> <p>Variabel Pemoderasi: Dewan Komisaris</p>	Agresivitas pajak berpengaruh positif pada pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Selain itu, kehadiran dewan komisaris secara statistik menunjukkan nilai yang negatif atau memperlemah pengaruh agresivitas pajak terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Hasil tersebut menegaskan fungsi kontroling yang dimiliki oleh dewan komisaris
7	Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebecca (2016)	Pengaruh Likuiditas dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2014	<p>Dependen: Agresivitas Pajak Perusahaan</p> <p>Independen: Likuiditas dan <i>Leverage</i></p>	Likuiditas berpengaruh dalam memberikan kontribusi terhadap agresivitas pajak, <i>leverage</i> berpengaruh dalam memberikan kontribusi terhadap agresivitas pajak dan likuiditas dan <i>leverage</i> berpengaruh dalam memberikan kontribusi terhadap agresivitas pajak
8	Imam Fadli (2016)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013)	<p>Dependen: Agresivitas Pajak Perusahaan</p> <p>Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i>, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional</p>	Likuiditas, <i>leverage</i> , komisaris independen, dan manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak
9	Agus Purwanto (2016)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Manajemen Laba, dan Kopersasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013	<p>Dependen: Agresivitas Pajak Perusahaan</p> <p>Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i>, Manajemen Laba, dan Kopersasi Rugi Fiskal</p>	Likuiditas, <i>leverage</i> , dan manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan kopersasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
10	Ana Melyana (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Otomotif, Komponen, dan Kabel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, <i>Firm Size</i> , dan <i>Profitability</i>	<i>Firm size</i> dan <i>profitability</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>leverage</i> dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
11	Dessy Mayangsari (2017)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Agresivitas Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013)	Dependen : Agresivitas Pajak Perusahaan Independen : Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan <i>Good Corporate Governance</i>	Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Likuiditas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. <i>Leverage</i> berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. <i>Good Corporate Governance</i> yang diprosikan dengan Proporsi Komisaris Independen perusahaan manufaktur sektor aneka industri memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. <i>Corporate Governance</i> yang diprosikan dengan Komite Audit perusahaan manufaktur sektor aneka industri memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan <i>Good Corporate Governance</i> secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan

(Sumber: penelitian yang terkait, 2018)

2.9 Kerangka Pemikiran

2.9.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha (bisnis) pasti memiliki tujuan ingin menghasilkan laba yang optimal atas usaha yang dijalankannya. Oleh karena itu, biasanya perusahaan menggunakan *profitabilitas* untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio *profitabilitas* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan

modal. Rasio *profitabilitas* dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan (Hery, 2015). Dengan kata lain, semakin baik rasio *profitabilitas* maka menggambarkan semakin baik manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan, sehingga diduga semakin tinggi *profitabilitas* perusahaan akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gemilang (2017), Mayasari, dkk (2017), dan Melyana (2017) yang menunjukkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Gemilang (2017), Mayasari, dkk (2017), dan Melyana (2017) dalam menentukan rasio *profitabilitas* yaitu dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA), sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan rasio Margin Laba Bersih/*Net Profit Margin* (NPM) untuk mengetahui apakah dengan menggunakan NPM, *profitabilitas* tetap berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.9.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

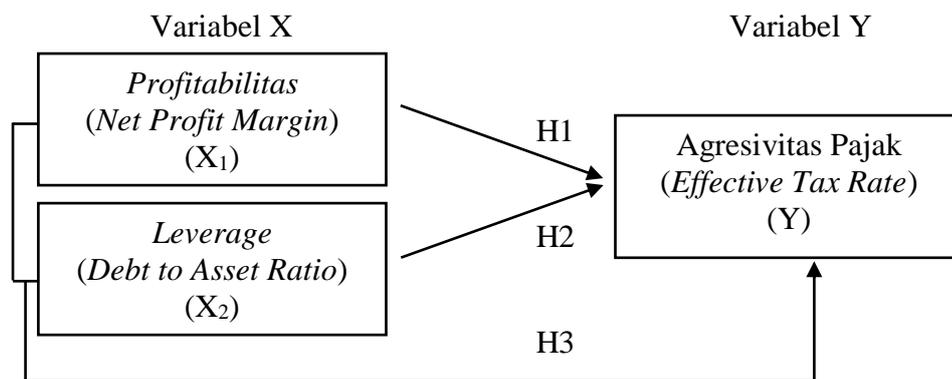
Dalam menjalankan kegiatan usaha (bisnis) tentu saja perusahaan membutuhkan dana dalam jumlah yang memadai. Dana ini tidak hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan saja melainkan juga membiayai aktivitas investasi perusahaan. Dalam memperoleh dana untuk kepentingan pembiayaan, perusahaan-perusahaan pada umumnya memiliki beberapa sumber alternatif, seperti dana yang dimiliki oleh pemilik (modal) maupun dana pinjaman. Penting bagi manajer keuangan untuk menyiasati kebutuhan dana perusahaan dengan cara melakukan kombinasi sumber pembiayaan antara pinjaman dan modal. Kombinasi penggunaan dana ini dapat ditunjukkan melalui rasio *leverage*. Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Dengan kata lain rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam rangka pemenuhan aset (Hery, 2015). Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga diduga akan mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2015), Sukmawati, dkk (2016), Fadli (2016), dan Purwanto (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh dalam memberikan kontribusi terhadap agresivitas pajak.

2.9.3 Pengaruh *Profitabilitas* dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan cara untuk membayar pajak lebih efisien dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Oleh karena itu perusahaan diduga melakukan tindakan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Adapun salah satu tindakan yang diduga digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya ialah dengan memanfaatkan beban bunga atas pinjaman modal untuk aktivitas operasinya, karena beban bunga akan mengurangi laba sehingga dengan berkurangnya laba maka beban pajak tahun berjalan juga berkurang. Menurut Gemilang (2017) tindakan yang

dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*) disebut dengan agresivitas pajak perusahaan. Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak (Nugraha, 2015). Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif (Gemilang, 2017). Menurut Nugraha (2015), agresivitas pajak didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Artinya, kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen berupa agresivitas pajak, sedangkan variabel independen berupa rasio *profitabilitas* dengan menggunakan NPM, dan rasio *leverage* dengan menggunakan DAR yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Keterkaitan antar variabel dinyatakan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.10 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2016). Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis dari penelitian ini adalah:

H1 : *Net profit margin* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H2 : *Debt to assets ratio* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H3 : *Net profit margin*, dan *Debt to assets ratio* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif dengan metode penelitian *explanatory survey*, yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Teknik penelitian yang digunakan adalah statistik kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan Pengaruh Rasio *Profitabilitas* dan *Leverage* Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel NPM dan DAR, serta pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka peneliti melakukan penelitian atas variabel-variabel tersebut pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013-2017.

3.2.2 Unit Analisis Penelitian

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi/perusahaan. Divisi organisasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data berupa angka dan dapat diukur serta diuji dengan metode statistik. Sedangkan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017. Peneliti mendapatkan data dan informasi melalui *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id dan *website* www.sahamok.com.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Menurut Sugiyono (2016), variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah rasio *profitabilitas* dengan menggunakan NPM dan rasio *leverage* dengan menggunakan DAR.

2. Variabel Terikat/Tidak Bebas (*Dependent Variable*)

Menurut Sugiyono (2016), variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah agresivitas pajak perusahaan dengan menggunakan ETR.

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel

Pengaruh Rasio *Profitabilitas* dan *Leverage* Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak
(Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013-2017)

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
<i>Profitabilitas</i>	<i>Net Profit Margin</i> (NPM)	$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$ <p>Semakin Tinggi berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih</p>	Rasio
<i>Leverage</i>	<i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR)	$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ <p>Semakin tinggi DAR berarti semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat melunasi kewajibannya.</p>	Rasio
Agresivitas Pajak	<i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$ <p>Semakin rendah nilai ETR mengindikasikan adanya agresivitas pajak dalam perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.</p>	Rasio

(sumber: tinjauan pustaka yang terkait, 2018)

3.5 Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel data perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penarikan sampel

dalam penelitian ini, yaitu dengan metode *purposive sampling*, artinya pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti sehingga sampel hanya representative untuk populasi yang diteliti (Arifin, 2017).

Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan untuk Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak *delisting* selama periode 2013-2017.
2. Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang mempublikasikan laporan keuangan dan tahunan secara lengkap yang setiap tahunnya berakhir per 31 Desember dan memenuhi perhitungan variabel yang dibutuhkan.
3. Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang memiliki laba selama periode 2013-2017.

Tabel 3.2
Proses Seleksi Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Populasi	44
2	Tidak Memenuhi Kriteria 1	(2)
3	Tidak Memenuhi Kriteria 2	(12)
4	Tidak Memenuhi Kriteria 3	(9)
	Jumlah Sampel	21

(Sumber : www.idx.co.id, data diolah peneliti, 2018)

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka sebanyak 21 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Nama-nama perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perusahaan Yang Menjadi Objek Penelitian

N0	Kode Saham	Nama Emiten
1	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT (D.H Cahaya Kalbar Tbk, PT)
2	DLTA	Delta Djakarta Tbk, PT
3	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT
4	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk, PT
5	MYOR	Mayora Indah Tbk, PT
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk,PT
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk, PT
8	SKLT	Sekar Laut Tbk, PT

N0	Kode Saham	Nama Emiten
9	STTP	Siantar Top Tbk, PT
10	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry And Tranding Company Tbk, PT
11	GGRM	Gudang Garam Tbk
12	HMSP	Handjaya Mandala Sampoerna Tbk
13	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk
14	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
15	KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk
16	KLBF	Kalbe Farma Tbk
17	MERK	Merck Indonesia Tbk
18	PYFA	Pyridam Farma Tbk
19	TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk
20	TCID	Mandom Indonesia Tbk
21	UNVR	Unilever Indonesia Tbk

(Sumber: www.idx.co.id, data diolah peneliti, 2018)

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data pendukung dari buku, maupun dari penelitian terdahulu. Selain itu metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengakses dan mengunduh data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi pada tahun 2013-2017 yang diterbitkan oleh penyedia data, yaitu Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi www.idx.co.id, serta data juga di dapatkan dari www.sahamok.com sebagai bahan penunjang penelitian. Data tersebut dimaksud agar dapat mendukung informasi menjadi lebih akurat dan lengkap.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Data yang dikumpulkan mengenai semua variabel penelitian kemudian diolah atau dianalisis dengan menggunakan software E-Views 9. Metode yang digunakan adalah metode Analisis Regresi Data Panel. Berikut pengujian dalam penelitian ini :

3.7.1 Analisis Regresi Data Panel

Salah satu bentuk struktur data yang sering digunakan dalam studi ekonometrika adalah data panel. Data dengan karakteristik panel adalah data yang berstruktururut waktu sekaligus *cross section* (antarindividu) pada suatu periode tertentu (Ariefianto, 2012). Maka model regresi yang menggunakan data seperti ini, disebut sebagai model regresi data panel (Gujarati, 2012). Formulasi persamaan analisis regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} = Variabel Terikat (Dependen)

X_{it} = Variabel bebas (Independen)

i = entitas ke- i

t = periode ke- t

3.7.2 Pemilihan Model

Menurut Sriyana (2014), untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga teknik (model) yang sering ditawarkan, yaitu:

a. Model *Common Effect*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk *pool*, dan menggunakan teknik kuadrat terkecil atau *least square* untuk mengestimasi koefisiennya. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku individu tidak berbeda dalam berbagai kurun waktu.

b. Model *Fixed Effect*

Asumsi pembuatan model yang menghasilkan intersep konstan untuk setiap individu (i) dan waktu (t) dianggap kurang realistis sehingga dibutuhkan model yang lebih dapat menangkap perbedaan tersebut. Model efek tetap (*fixed effects*), model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepanya. Untuk mengestimasi model *Fixed Effects* dengan intersep berbeda antar individu, maka digunakan teknik variable dummy. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)*.

c. Model *Random Effect*

Di dalam mengestimasi data panel dengan model *Fixed Effects* melalui teknik *LSDV* menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan variabel residual yang dikenal sebagai model *Random Effects*. Pada model ini, akan dipilih estimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Oleh karena itu, pada model ini diasumsikan bahwa ada perbedaan intersep untuk setiap individu dan intersep tersebut merupakan variable random atau stakastik. Sehingga dalam model ini terdapat dua komponen residual, yaitu residual secara menyeluruh, yang merupakan kombinasi *time series* dan *cross section*, dan residual secara individu yang merupakan karakteristik random dari observasi unit ke- i dan tetap sepanjang waktu.

Menurut Widarjono (2013) ada tiga uji memilih teknik estimasi data panel. Pertama, uji Chow digunakan untuk memilih antara metode *common effect* atau metode *fixed effect*. Kedua uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara *fixed effect* atau metode *random effect*. Ketiga uji *Langrange Multiplier (LM)* digunakan untuk memilih antara metode *common effect* atau metode *random effect*.

a. Uji Chow

Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan apakah model *fixed effect* atau PLS yang lebih tepat untuk digunakan dalam model statistik penelitian. Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut :

H_0 : Menggunakan model Common Effect (CE)

H_1 : Menggunakan model Fixed Effect (FE)

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F-stat, apabila nilai prob F stat lebih kecil dari alpha 0,05 maka model penelitian lebih tepat menggunakan model FE atau menolak H_0 .

b. Uji Hausman

Uji Hausman adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah model FE atau RE yang lebih tepat untuk digunakan. Hipotesis dalam uji LM adalah sebagai berikut :

H_0 : Menggunakan model RE

H_1 : Menggunakan model FE

Untuk menentukan hipotesis mana yang diterima, maka dilihat nilai probabilitas F-stat. apabila nilai prob F-stat lebih kecil dari alpha 0,05 maka regresi model lebih tepat menggunakan model FE atau menolak H_0 .

c. Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah model RE atau CE yang lebih tepat untuk digunakan. Hipotesis dalam uji LM adalah sebagai berikut :

H_0 : Menggunakan model CE

H_1 : Menggunakan model Random Effect (RE)

Untuk menentukan hipotesis mana yang diterima, maka dilihat nilai probabilitas *chi-square*. Apabila nilai prob *chi-square* lebih kecil dari alpha 0,05 maka regresi model lebih tepat menggunakan model RE atau menolak H_0 . apabila prob *chi-square* lebih besar dari alpha 0,05 maka regresi model lebih tepat menggunakan model CE (*Common Effect*) atau menolak H_1 . Metode CE digunakan ketika asumsi-asumsi yang disyaratkan oleh metode OLS (homokedastis dan nonautokorelasi) tidak terpenuhi.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Sebuah model regresi yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Uji asumsi klasik dilakukan agar hasil regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linier, Unbiased Estimator*). Berikut termasuk ke dalam uji asumsi klasik:

a. Uji Normalitas

Menurut Winarno (2015), untuk pengujian lebih akurat diperlukan analisis dan E-Views menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-bera. Disini metode yang digunakan yaitu Jarque-bera. Jarque-bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Pada angka Jarque-bera diatas sebesar 0,05 (>5%), Ho tidak dapat ditolak bahwa data berdistribusi.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heterokedastisitas. Heterokedastisitas biasanya terjadi pada jenis data *cross section*. Karena regresi data panel memiliki karakteristik tersebut, maka ada kemungkinan terjadi heterokedastisitas. Dari ketiga model regresi data panel hanya *common effect* dan *fixed effect* saja yang memungkinkan terjadinya heterokedastisitas sedangkan random effect tidak terjadi.

Pada penelitian ini akan dilakukan uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji geljser. Uji geljser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai prob. > 0,05. Maka hal tersebut menunjukkan data terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitasn.

c. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Multikolonieritas terjadi jika nilai *tolerance* dibawah 0,10 dan VIF diatas 10. Alternatif lain yaitu dengan melihat hasil koefisien korelasi antar variabel independen. Koefisien korelasi yang tinggi mengindikasikan adanya Multikolinieritas (Santoso, 2012). Jika pada matriks tidak ada nilai > 0,90 maka tidak terjadi multikolinieritas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2016).

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji *Durbin-Watson (DW)*, dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai *Durbin-Watson*. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan kriteria *Durbin-Watson* berikut:

Tabel 3.4

Kriteria Autokorelasi *Durbin-Watson (DW)*

Hipotesis	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No <i>decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No <i>decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

(Sumber: Ghozali, 2016)

3.7.4 Uji Hipotesis Penelitian

Persamaan regresi berganda merupakan persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen. Dasar pengambilan keputusan dalam analisa Regresi Berganda adalah dengan menggunakan Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t), Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) dan koefisien determinasi (R^2).

- a. Uji
Statistik t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika hasil perhitungan nilai signifikan $< \alpha$ 5% menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

- b. Uji
Statistik F

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Jika hasil perhitungan nilai signifikan $< \alpha$ 5 % menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

- c. Analisi
s Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui berapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang semakin mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen secara sempurna dapat menjelaskan variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependen berupa agresivitas pajak, sedangkan variabel independen berupa rasio profitabilitas dengan menggunakan NPM, dan rasio *leverage* dengan menggunakan DAR. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 sebanyak 44 perusahaan.

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari www.sahamok.com perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diklasifikasikan berdasarkan jenis Produk yang dihasilkan, yaitu:

1. Makanan dan Minuman
2. Rokok
3. Farmasi
4. Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga
5. Peralatan Rumah Tangga

Prosedur pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan untuk Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak *delisting* selama periode 2013-2017.
2. Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang mempublikasikan laporan keuangan dan tahunan secara lengkap yang setiap tahunnya berakhir per 31 Desember dan memenuhi perhitungan variabel yang dibutuhkan.
3. Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang memiliki laba selama periode 2013-2017.

Berdasarkan kriteria di atas, prosedur penetapan sampel penelitian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Prosedur Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017	44
Perusahaan untuk Sektor Industri Barang Konsumsi yang tidak di <i>delisting</i> selama periode 2013-2017	42
Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap serta memenuhi perhitungan variabel yang dibutuhkan	30

Keterangan	Jumlah
Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang tidak mengalami kerugian selama periode 2013-2017	21
Jumlah sampel perusahaan yang diteliti	21
Periode pengamatan selama 5 tahun	5
Jumlah data penelitian (5x21)	105

(sumber: data diolah peneliti, 2018)

Berdasarkan kriteria dan prosedur pengambilan sampel diatas maka didapatkan sampel sebanyak 21 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut :

Tabel 4.2

Daftar Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi
yang Menjadi Objek Penelitian

N0	Kode Saham	Nama Emiten
1	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
2	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk
3	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
4	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
5	MYOR	PT Mayora Indah Tbk
6	ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk
7	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk
8	SKLT	PT Sekar Laut Tbk
9	STTP	PT Siantar Top Tbk
10	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry And Trading Company Tbk
11	GGRM	PT Gudang Garam Tbk
12	HMSP	PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk
13	WIIM	PT Wismilak Inti Makmur Tbk
14	DVLA	PT Darya Varia Laboratoria Tbk

N0	Kode Saham	Nama Emiten
15	KAEF	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
16	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
17	MERK	PT Merck Indonesia Tbk
18	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk
19	TSPC	PT Tempo Scan Pasific Tbk
20	TCID	PT Mandom Indonesia Tbk
21	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk

(sumber: data diolah peneliti, 2018)

4.1.1. Perbandingan Profitabilitas (NPM) dan *Leverage* (DAR) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi

1. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam mengelola perusahaan dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya.

Menurut Hery (2015) berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba bersih/NPM:

$$\text{Margin Laba Bersih (NPM)} = \frac{\text{lab a bersih}}{\text{penjualan bersih}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 4.3

Net Profit Margin (NPM) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017

No	Kode Saham	NPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	CEKA	0.026	0.011	0.031	0.061	0.025
2	DLTA	0.312	0.328	0.275	0.328	0.360
3	ICBP	0.089	0.086	0.092	0.105	0.100
4	INDF	0.059	0.082	0.058	0.079	0.073
5	MYOR	0.088	0.029	0.084	0.076	0.078
6	ROTI	0.105	0.100	0.124	0.111	0.054
7	SKBM	0.045	0.061	0.029	0.015	0.014
8	SKLT	0.020	0.024	0.027	0.025	0.025
9	STTP	0.068	0.057	0.073	0.066	0.076

No	Kode Saham	NPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
10	ULTJ	0.094	0.072	0.119	0.151	0.146
11	GGRM	0.079	0.083	0.092	0.087	0.093
12	HMSP	0.144	0.126	0.116	0.134	0.128
13	WIIM	0.083	0.068	0.071	0.063	0.027
14	DVLA	0.114	0.074	0.083	0.105	0.103
15	KAEF	0.050	0.057	0.052	0.047	0.054
16	KLBF	0.123	0.122	0.115	0.121	0.122
17	MERK	0.147	0.211	0.145	0.149	0.125
18	PYFA	0.032	0.012	0.014	0.024	0.032
19	TSPC	0.093	0.078	0.065	0.060	0.058
20	TCID	0.079	0.076	0.235	0.064	0.066
21	UNVR	0.174	0.172	0.160	0.160	0.160
	Mean	0.096	0.092	0.098	0.097	0.091
	Max	0.312	0.328	0.275	0.328	0.360
	Min	0.020	0.011	0.014	0.015	0.014

(sumber: www.idx.co.id diolah oleh peneliti, 2018)

Tabel 4.3 didapatkan profitabilitas untuk rata-rata (*mean*) perusahaan sektor industri barang konsumsi pada tahun 2013 sebesar 0,096. Pada tahun 2013 perusahaan dengan tingkat profitabilitas terendah dengan nilai NPM sebesar 0,020 adalah PT Sekar Laut Tbk (SKLT). Kemudian untuk perusahaan dengan tingkat profitabilitas tertinggi dengan nilai NPM sebesar 0,312 adalah PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

Pada tahun 2014 nilai rata-rata NPM turun menjadi 0,092 atau mengalami penurunan sebesar 0,04 jika dibandingkan dengan tahun 2013 artinya 21 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi mengalami penurunan sebesar 4 persen dalam menghasilkan laba. Nilai NPM terendah sebesar 0,011 dihasilkan oleh PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA). Nilai NPM tertinggi sebesar 0,328 dihasilkan oleh PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

Pada tahun 2015 nilai rata-rata NPM kembali naik menjadi 0,098 atau mengalami kenaikan sebesar 0,06 jika dibandingkan dengan tahun 2014 artinya 21 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi mengalami kenaikan sebesar 6 persen dalam menghasilkan laba. Nilai NPM terendah sebesar 0,014 dihasilkan oleh PT Pyridam Farma Tbk (PYFA). Sedangkan nilai NPM tertinggi sebesar 0,275 dihasilkan oleh PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

Pada tahun 2016 nilai rata-rata NPM kembali turun menjadi 0,097 atau mengalami penurunan sebesar 0,01 jika dibandingkan dengan tahun 2015 artinya 21 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi mengalami penurunan sebesar 1 persen dalam mengelola aset dan ekuitas yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba. Nilai NPM terendah sebesar 0,015

dihasilkan oleh PT Sekar Bumi Tbk (SKBM). Nilai NPM tertinggi sebesar 0,328 dihasilkan oleh PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

Pada tahun 2017 nilai rata-rata NPM kembali turun menjadi 0,091 atau mengalami penurunan sebesar 0,06 jika dibandingkan dengan tahun 2016 artinya 21 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi mengalami penurunan sebesar 6 persen dalam menghasilkan laba. Nilai NPM terendah sebesar 0,014 dihasilkan oleh PT Sekar Bumi Tbk (SKBM). Nilai NPM tertinggi sebesar 0,360 dihasilkan oleh PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

2. Leverage

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi asetnya, apakah lebih besar menggunakan dana pinjaman (hutang) atau menggunakan dana yang telah disiapkan oleh pemilik (modal). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio hutang (Hery, 2015):

$$\text{Rasio Utang terhadap Aset (DAR)} = \frac{\text{total hutang}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan *leverage* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 4.4

Debt to Asset Ratio (DAR) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017

No	Kode Saham	DAR				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	CEKA	0.506	0.581	0.569	0.377	0.354
2	DLTA	0.220	0.238	0.182	0.155	0.146
3	ICBP	0.376	0.417	0.383	0.360	0.357
4	INDF	0.509	0.532	0.530	0.465	0.468
5	MYOR	0.594	0.604	0.542	0.515	0.507
6	ROTI	0.568	0.555	0.561	0.506	0.381
7	SKBM	0.596	0.529	0.550	0.632	0.370
8	SKLT	0.538	0.537	0.597	0.479	0.517
9	STTP	0.528	0.520	0.474	0.500	0.409
10	ULTJ	0.283	0.221	0.210	0.177	0.189
11	GGRM	0.421	0.429	0.402	0.372	0.368
12	HMSP	0.483	0.524	0.158	0.196	0.209
13	WIIM	0.364	0.366	0.297	0.268	0.202
14	DVLA	0.231	0.237	0.293	0.295	0.320
15	KAEF	0.343	0.429	0.425	0.508	0.578
16	KLBF	0.249	0.215	0.201	0.181	0.164

No	Kode Saham	DAR				
		2013	2014	2015	2016	2017
17	MERK	0.265	0.235	0.262	0.217	0.273
18	PYFA	0.464	0.437	0.367	0.368	0.318
19	TSPC	0.286	0.272	0.310	0.296	0.316
20	TCID	0.193	0.307	0.176	0.184	0.213
21	UNVR	0.681	0.668	0.693	0.719	0.726
	Mean	0.414	0.422	0.390	0.370	0.352
	Max	0.681	0.668	0.693	0.719	0.726
	Min	0.193	0.215	0.158	0.155	0.146

(sumber: www.idx.co.id diolah oleh peneliti, 2018)

Tabel 4.4 menunjukkan *leverage* untuk rata-rata (mean) perusahaan sektor industri barang konsumsi pada tahun 2013 sebesar 0,414. Pada tahun 2013 perusahaan dengan tingkat *leverage* terendah dengan nilai DAR sebesar 0,193 adalah PT Mandom Indonesia Tbk (TCID). Kemudian untuk perusahaan dengan tingkat *leverage* tertinggi dengan nilai DAR sebesar 0,681 adalah PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

Pada tahun 2014 nilai rata-rata DAR naik menjadi 0,422 atau mengalami kenaikan sebesar 0,08 jika dibandingkan dengan tahun 2013 artinya 21 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi mengalami penurunan sebesar 8 persen dalam penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap. Nilai DAR terendah sebesar 0,215 dihasilkan oleh PT Kalbe Farma Tbk (KLBF). Nilai DAR tertinggi sebesar 0,668 dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

Pada tahun 2015 nilai rata-rata DAR turun menjadi 0,390 atau mengalami penurunan sebesar 0,32 jika dibandingkan dengan tahun 2014 artinya 21 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi mengalami penurunan sebesar 32 persen dalam penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap. Nilai DAR terendah sebesar 0,158 dihasilkan oleh PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP). Nilai DAR tertinggi sebesar 0,693 dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

Pada tahun 2016 nilai rata-rata DAR turun menjadi 0,370 atau mengalami penurunan sebesar 0,20 jika dibandingkan dengan tahun 2015 artinya 21 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi mengalami penurunan sebesar 20 persen dalam penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap. Nilai DAR terendah sebesar 0,155 dihasilkan oleh PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Nilai DAR tertinggi sebesar 0,719 dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

Pada tahun 2017 nilai rata-rata DAR turun menjadi 0,352 atau mengalami penurunan sebesar 0,18 jika dibandingkan dengan tahun 2016 artinya 21

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi mengalami penurunan sebesar 18 persen dalam penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap. Nilai DAR terendah sebesar 0,146 dihasilkan oleh PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Nilai DAR tertinggi sebesar 0,726 dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

3. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan segala tindakan yang dilakukan manajemen melalui perencanaan pajak untuk mengurangi laba kena pajak, baik dengan cara *tax avoidance* atau *tax evasion*.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *Effective tax rate* Ardyansah (2014):

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan *Effective tax rate* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 4.5

Effective tax rate (ETR) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017

No	Kode Saham	ETR				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	CEKA	0.248	0.279	0.251	0.126	0.250
2	DLTA	0.245	0.241	0.232	0.222	0.242
3	ICBP	0.247	0.253	0.271	0.272	0.319
4	INDF	0.268	0.293	0.349	0.343	0.328
5	MYOR	0.219	0.226	0.238	0.248	0.254
6	ROTI	0.250	0.254	0.285	0.243	0.273
7	SKBM	0.256	0.188	0.251	0.268	0.185
8	SKLT	0.311	0.300	0.267	0.180	0.161
9	STTP	0.199	0.264	0.200	0.200	0.251
10	ULTJ	0.256	0.245	0.253	0.239	0.307
11	GGRM	0.261	0.251	0.253	0.253	0.257
12	HMSP	0.254	0.258	0.256	0.250	0.250
13	WIIM	0.244	0.249	0.263	0.222	0.255
14	DVLA	0.284	0.236	0.253	0.291	0.283
15	KAEF	0.241	0.251	0.252	0.291	0.262
16	KLBF	0.234	0.232	0.244	0.239	0.243
17	MERK	0.252	0.267	0.265	0.284	0.297
18	PYFA	0.271	0.368	0.322	0.270	0.258
19	TSPC	0.231	0.207	0.252	0.241	0.241

No	Kode Saham	ETR				
		2013	2014	2015	2016	2017
20	TCID	0.266	0.272	0.066	0.268	0.263
21	UNVR	0.252	0.252	0.253	0.254	0.253
	Mean	0.252	0.256	0.251	0.248	0.259
	Max	0.311	0.368	0.349	0.343	0.328
	Min	0.199	0.188	0.066	0.126	0.161

(sumber: www.idx.co.id diolah oleh peneliti, 2018)

Pada tabel 4.5 menyatakan bahwa pada perkembangan agresivitas pajak selama tahun 2013-2017 cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 nilai rata-rata dari agresivitas pajak dengan indikator *Effective tax rate* (ETR) sebesar 0,252. Nilai terendah ETR sebesar 0,199 diperoleh dari PT Siantar Top Tbk (STTP), dan nilai ETR tertinggi sebesar 0,311 diperoleh dari PT Sekar Laut Tbk (SKLT).

Pada tahun 2014 nilai rata-rata dari ETR mengalami kenaikan sebesar 0,04 menjadi 0,256 hal ini dapat dilihat jika dibandingkan dengan nilai ETR 2013. Nilai ETR terendah pada tahun 2014 sebesar 0,188 diperoleh dari PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) dan nilai ETR tertinggi sebesar 0,368 diperoleh dari Pyridam Farma Tbk (PYFA).

Tahun 2015 nilai rata-rata dari ETR mengalami penurunan sebesar 0,05 menjadi 0,251. Nilai ETR terendah pada tahun 2015 sebesar 0,066 diperoleh dari Mandom Indonesia Tbk (TCID) dan nilai ETR tertinggi sebesar 0,349 diperoleh dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Tahun 2016 nilai rata-rata dari ETR mengalami penurunan kembali sebesar 0,03 menjadi 0,248. Nilai ETR terendah pada tahun 2016 sebesar 0,126 diperoleh dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) dan nilai ETR tertinggi sebesar 0,343 diperoleh dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Dan pada tahun 2017 nilai rata-rata dari ETR mengalami kenaikan kembali sebesar 0,11 menjadi 0,259 hal ini dapat dilihat jika dibandingkan dengan nilai ETR 2016. Nilai ETR terendah pada tahun 2017 sebesar 0,161 diperoleh dari PT Sekar Laut Tbk (SKLT) dan nilai ETR tertinggi sebesar 0,328 diperoleh dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

4.2. Analisis Data

Pengujian “Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” dilakukan dengan pengujian statistik. Penelitian ini menggunakan software EViews 9. Metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Data Panel, dengan model *Fixed effect*. Beberapa pengujian dilakukan yaitu, Uji Chow, Uji Hausman, Uji Asumsi Klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi), Uji Hipotesis (uji koefisien secara parsial atau

uji t, uji koefisien secara bersama-sama atau uji F, uji koefisien determinasi). Adapun variabel yang diteliti yaitu Profitabilitas dengan indikator laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih (X1), *Leverage* dengan indikator total hutang dibagi total aset (X2) dan Agresivitas Pajak dengan indikator beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Y).

4.2.1. Pemilihan Model

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, untuk menguji spesifikasi model dan kesesuaian teori-teori dengan kenyataan. Pada bagian ini, akan dilakukan pemilihan model regresi data panel mana yang terbaik. Apakah *common effect*, *fixed effect* atau *random effect*. Pengolahan data untuk memilih model mana yang paling tepat, penelitian dilakukan secara elektronik dengan menggunakan software EViews 9. Pemilihan model ini berdasarkan pada tiga uji yaitu:

1. Uji Chow

Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan apakah model *fixed effect* atau PLS yang lebih tepat untuk digunakan dalam model statistic penelitian. Hipotesis dalam Uji Chow adalah sebagai berikut :

H_0 : Menggunakan model Common Effect (CE)

H_1 : Menggunakan model *Fixed effect* (FE)

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F-stat, apabila nilai prob F stat lebih kecil dari alpha 0,05 maka model penelitian lebih tepat menggunakan model FE atau menolak H_0 .

Hasil Uji Chow dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.6

Uji Chow

Redundant *Fixed effects* Tests
Equation: Untitled
Test cross-section *fixed effects*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.927341	(20,82)	0.0000
Cross-section Chi-square	70.545965	20	0.0000

(sumber: Output EViews 9, data diolah peneliti, 2018)

Hasil Uji Chow pada tabel 4.6 diatas menunjukkan nilai probabilitas cross section F = 0,0000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya model *fixed effect* yang tepat digunakan dibandingkan dengan common effect untuk mengestimasi data panel.

2. Uji Hausman

Setelah Uji Chow dilakukan dan memperoleh hasil bahwa model *fixed effect* yang digunakan, model data panel harus dibandingkan lagi antara *fixed effect* dengan *random effect* dengan menggunakan uji hausman. Uji Hausman adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah model FE atau RE yang lebih tepat untuk digunakan. Hipotesis dalam Uji LM adalah sebagai berikut :

H_0 : Menggunakan model RE

H_1 : Menggunakan model FE

Untuk menentukan hipotesis mana yang diterima, maka dilihat nilai probabilitas F-stat. apabila nilai prob F-stat lebih kecil dari alpha 0,05 maka regresi model lebih tepat menggunakan model FE atau menolak H_0 .

Hasil uji Hausman dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.7

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.681206	2	0.0001

(sumber: Output EViews 9, data diolah peneliti, 2018)

Dari hasil uji hausman pada tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas adalah 0,0001 atau lebih kecil dari pada alpha 0,05, artinya model *fixed effect* lebih baik dari pada random effect. Dilihat dari kedua uji di atas maka model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model *fixed effect*.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

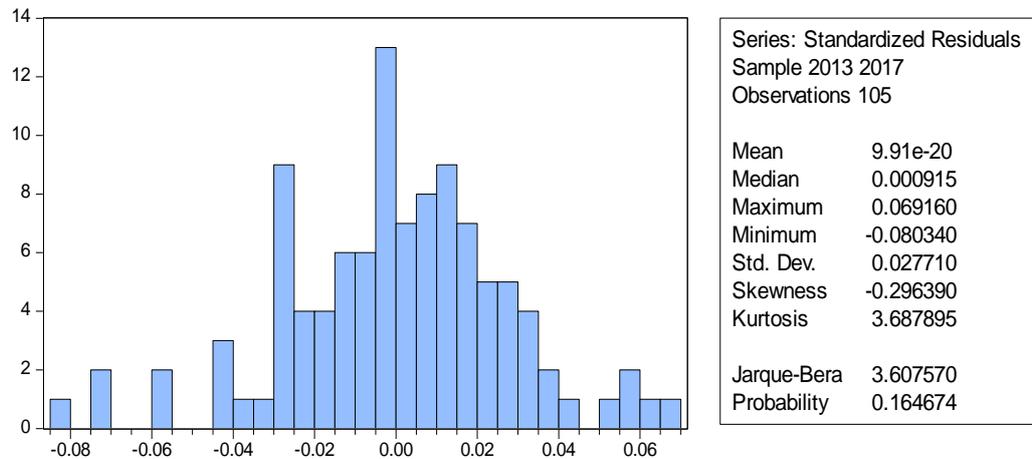
Sebuah model regresi yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Uji asumsi klasik dilakukan agar hasil regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linier, Unbiased Estimator*). Berikut termasuk ke dalam uji asumsi klasik:

1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas JB hitung dengan tingkat alpha 5 persen. Jika nilai probabilitas JB lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya.

Tabel 4.8

Uji Normalitas



(sumber: Output EViews 9, data diolah peneliti, 2018)

Dari tabel uji normalitas di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas JB 0,165 lebih besar dari 0,05, artinya data berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya.

Tabel 4.9

Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/14/18 Time: 20:27
 Sample: 2013 2017
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 21
 Total panel (balanced) observations: 105
 White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PROFITABILITY	0.177010	0.090691	1.951794	0.0544
LEVERAGE	-0.031290	0.022159	-1.412092	0.1617
C	0.016267	0.010542	1.543166	0.1266

(sumber: Output EViews 9, data diolah peneliti, 2018)

Dari hasil Uji Glejser di atas nilai probabilitas sebesar 0,0544 dan *leverage* 0,1617 maka nilai probabilitas pada setiap variabel independen > 0,05. Maka hal tersebut menunjukkan data terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.10
Uji Multikolinieritas

	PROFITABILITY	LEVERAGE
PROFITABILITY	1.000000	-0.363408
LEVERAGE	-0.363408	1.000000

(sumber: Output EViews 9, data diolah peneliti, 2018)

Dari hasil uji multikolinieritas yang tertera pada tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa pada model tersebut tidak terjadi multikolinieritas, karena pada matriks korelasi tersebut tidak ada nilai $> 0,90$.

4. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan Uji *Durbin-Watson (DW)*, dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai *Durbin-Watson*.

Tabel 4.11
Uji Autokorelasi

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.503707	Hannan-Quinn criter.	-3.669982
Adjusted R-squared	0.370556	Durbin-Watson stat	1.835803

(sumber: Output EViews 9, data diolah peneliti, 2018)

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai *Durbin-Watson*. Dari data 4.11 dapat dilihat nilai *Durbin-Watson* 1,8358 dan diketahui nilai DU sebesar 1,7209 maka $4-DU = 4 - 1,7209 = 2,2791$. Hal ini menunjukkan $DU < d < 4 - DU$ atau $1,7209 < 1,8358 < 4 - 1,7209$ atau $1,7209 < 1,8358 < 2,2791$ yang artinya tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

4.2.3. Analisis Regresi Data Panel

Regresi Data Panel adalah gabungan antara data cross section dan data time series, dimana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda.

Berikut adalah hasil uji regresi data panel menggunakan metode *fixed effect*:

Tabel 4.12

Regresi Data Panel Model *Fixed effect*

Dependent Variable: ETR
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/14/18 Time: 16:45
 Sample: 2013 2017
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 21
 Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PROFITABILITY	-0.641690	0.142089	-4.516102	0.0000
LEVERAGE	0.117250	0.051173	2.291228	0.0245
C	0.268439	0.024682	10.87597	0.0000

(sumber: Output EViews 9, data diolah peneliti, 2018)

Formulasi persamaan analisis regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

$$Y_{it} = 0.268439 - 0.641690 \text{ NPM} + 0.117250 \text{ DAR} + e_{it}$$

Keterangan :

α = Kostanta

Y_{it} = Variabel Terikat (Dependen)

X_{it} = Variabel bebas (Independen)

i = entitas ke- i

t = periode ke- t

Dari persamaan model regresi linier berganda tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta

Konstanta sebesar 0.268439 artinya jika Profitabilitas dan *Leverage* nilainya adalah 0, maka agresivitas pajaknya sebesar 0.268439.

2. Koefisien Regresi Variabel Profitabilitas

Nilai koefisien regresi variabel profitabilitas yang diukur dengan *Net Profit Margin* (NPM) bernilai negatif, yaitu sebesar -0.641690. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan NPM sebesar satu satuan maka dapat mengakibatkan turunnya agresivitas pajak (ETR) sebesar -0.641690 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.

3. Koefisien Regresi Variabel *Leverage*

Nilai koefisien regresi variabel *leverage* yang diukur dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) bernilai positif, yaitu sebesar 0.117250. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan DAR sebesar satu satuan maka dapat mengakibatkan naiknya agresivitas pajak (ETR) sebesar 0.117250 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.

4.2.4. Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan model *fixed effect*.

1. Uji Statistik t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika hasil perhitungan nilai signifikan $< \alpha$ 5 persen menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas setiap variabel.

Tabel 4.13

Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PROFITABILITY	-0.641690	0.142089	-4.516102	0.0000
LEVERAGE	0.117250	0.051173	2.291228	0.0245
C	0.268439	0.024682	10.87597	0.0000

(sumber: Output EViews 9, data diolah peneliti, 2018)

Analisis uji t berdasarkan tabel adalah sebagai berikut :

a) Profitabilitas (NPM) (X1) terhadap Agresivitas Pajak (Y)

Berdasarkan tingkat signifikan:

H_{0.1} jika Sig. $< 0,05$ maka NPM secara parsial berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

H_{1.1} jika Sig. $> 0,05$ maka NPM secara parsial tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Dilihat dari tabel 4.13 nilai signifikan NPM 0,0000 yang artinya sig. $< 0,05$ atau $0,0000 < 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa NPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas pajak.

b) Leverage (DAR) (X2) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan tingkat signifikan:

H_{0.1} jika Sig. $< 0,05$ maka DAR secara parsial berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

H_{1.1} jika Sig. $> 0,05$ maka DAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Dilihat dari tabel 4.13 nilai signifikan DAR 0,0245 yang artinya sig. $< 0,05$ atau $0,0245 < 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa DAR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas pajak.

2. Uji Statistik F

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Jika hasil perhitungan nilai signifikan $< \alpha$ 5 persen menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas (F-Statistik).

Tabel 4.14

Uji Statistik F

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.503707	Mean dependent var	0.253210
Adjusted R-squared	0.370556	S.D. dependent var	0.039333
S.E. of regression	0.031206	Akaike info criterion	-3.905554
Sum squared resid	0.079853	Schwarz criterion	-3.324210
Log likelihood	228.0416	Hannan-Quinn criter.	-3.669982
F-statistic	3.782961	Durbin-Watson stat	1.835803
Prob(F-statistic)	0.000006		

(sumber: Output EViews 9, data diolah peneliti, 2018)

Analisis uji F berdasarkan tabel adalah sebagai berikut :

- 1) H_0 jika Sig. $< 0,05$ maka NPM dan DAR secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- 2) H_1 jika Sig. $> 0,05$ maka NPM dan DAR secara simultan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Dilihat dari tabel 4.14 nilai signifikan sebesar 0,000006 yang artinya sig. $< 0,05$ atau $0,000006 < 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa NPM dan DAR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas pajak.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui berapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.

Tabel 4.15
Uji Koefisien Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.503707	Mean dependent var	0.253210
Adjusted R-squared	0.370556	S.D. dependent var	0.039333
S.E. of regression	0.031206	Akaike info criterion	-3.905554
Sum squared resid	0.079853	Schwarz criterion	-3.324210
Log likelihood	228.0416	Hannan-Quinn criter.	-3.669982
F-statistic	3.782961	Durbin-Watson stat	1.835803
Prob(F-statistic)	0.000006		

(sumber: Output EViews 9, data diolah peneliti, 2018)

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinan (R^2) diperoleh sebesar 0,370556 atau 37,06 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 37,06 persen agresivitas pajak dipengaruhi oleh variabel profitabilitas dan *leverage*. Sisanya 62,94 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi

Pada hasil pengujian bahwa profitabilitas yang menggunakan indicator *Net Profit Margin* (X1) memiliki t_{hitung} sebesar 4.516102 dan t_{tabel} sebesar 2,101 maka ($t_{hitung} > t_{tabel}$) ($4.516102 > 2,101$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,0000 < 0,05$). Sehingga Hipotesis 1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

4.3.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi

Pada hasil pengujian bahwa *leverage* yang menggunakan indicator *Debt to Asset Ratio* (X1) memiliki t_{hitung} sebesar 2.291228 dan t_{tabel} sebesar 2,101 maka ($t_{hitung} > t_{tabel}$) ($2.291228 > 2,101$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0245 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,0245 < 0,05$). Sehingga Hipotesis 2 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

4.3.3. Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi

Pada hasil pengujian bahwa profitabilitas (*Net Profit Margin*) dan *leverage* (*Debt to Asset Ratio*) memiliki F_{hitung} sebesar 3.782961 dan F_{tabel} sebesar 3,55 maka ($F_{hitung} > F_{tabel}$) ($3.782961 > 3,55$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000006 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,000006 < 0,05$). Sehingga Hipotesis 3 diterima. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (*Net Profit Margin*) dan *leverage* (*Debt to Asset Ratio*) berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Tabel 4.16

Ringkasan Hasil Penelitian

No	Keterangan	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
1	Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak	H1 = <i>Net Profit Margin</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak	<i>Net Profit Margin</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak	Diterima
2	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak	H2 = <i>Debt to Asset Ratio</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak	<i>Debt to Asset Ratio</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak	Diterima
3	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak	H3 = <i>Net Profit Margin</i> dan <i>Debt to Asset Ratio</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak	<i>Net Profit Margin</i> dan <i>Debt to Asset Ratio</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak	Diterima

(sumber: data diolah peneliti, 2018)

4.4. Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukan pengujian hipotesis dan statistik oleh penulis pada 21 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 dengan menggunakan software EViews 9 tentang pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak, maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

4.4.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Berdasarkan penelitian ini, profitabilitas yang menggunakan indikator *Net Profit Margin* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,0000 < 0,05$) dan nilai dari ($t_{hitung} > t_{tabel}$) ($4.516102 > 2,101$).

Dalam penelitian ini profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hubungan negatif ini mengindikasikan perusahaan yang semakin efisien dan mempunyai profit yang tinggi membayar beban pajak yang rendah. Alasan yang memungkinkan adalah bahwa laba perusahaan dikelola untuk

mendapatkan keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya untuk menurunkan ETR.

Jika perusahaan memperoleh pendapatan yang besar akan mempengaruhi perusahaan dalam memiliki jumlah aset yang lebih besar. Kepemilikan aset yang besar bagi perusahaan dapat menimbulkan biaya yang dapat menambah atau mengurangi laba sebelum pajak. Selain itu apabila perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan mengurangi nilai rasio *effective tax rate* yang nantinya akan mempengaruhi agresivitas pajak.

Gemilang (2017) menyebutkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan ETR bersifat langsung dan signifikan. Semakin besar profitabilitas maka semakin besar juga ETR maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka perusahaan akan mengurangi tindakan agresivitas pajak karena perusahaan yang memiliki profitabilitas besar akan terlihat dalam laporan keuangan dan tentunya memiliki beban pajak yang lebih besar yang harus dibayarkan.

Dalam penelitian ini terdapat 10 dari 21 sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi tahun 2013-2017 yang terindikasi melakukan upaya agresivitas pajak dengan meminimalkan beban pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan, dan 11 perusahaan lainnya tidak terindikasi melakukan upaya agresivitas pajak. Perusahaan yang terindikasi melakukan upaya agresivitas pajak yaitu perusahaan CEKA, DLTA, MYOR, SKBM, SKLT, STTP, WIIM, KLBF, TSPC, dan TCID karena pada saat *Net Profit Margin* perusahaan tinggi akan tetapi ETR perusahaan tersebut berada dibawah 25 persen.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gemilang (2017), Mayasari, dkk (2017) dan Melyana (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2015) dan Ardyansah (2014) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

4.4.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Berdasarkan penelitian ini, *leverage* yang menggunakan indikator *Debt to Asset Ratio* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai signifikansi sebesar 0,0245 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,0245 < 0,05$) dan nilai dari ($t_{hitung} > t_{tabel}$) ($2,291228 > 2,101$).

Dalam penelitian ini *leverage* memiliki hubungan positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hubungan positif ini mengindikasikan bahwa perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of*

return) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan sebagai biaya (*tax deductible*) dalam proses penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) badan.

Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu makin tinggi tarif bunga akan makin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat 10 dari 21 sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi tahun 2013-2017 yang terindikasi melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi beban pajak perusahaan, dan 11 perusahaan lainnya tidak terindikasi melakukan upaya agresivitas pajak. Perusahaan yang terindikasi melakukan upaya agresivitas pajak yaitu perusahaan CEKA, DLTA, MYOR, SKBM, SKLT, STTP, WIIM, KLBF, TSPC, dan TCID karena pada saat *Debt to Asset Ratio* perusahaan tinggi dan nilai ETR perusahaan tersebut berada dibawah 25 persen.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2015), Sukmawati (2016), Fadli (2016), dan Purwanto (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gemilang (2017), Ardyansah (2014), dan Mayasari dkk (2017) yang menyatakan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

4.4.3. Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Koefisien regresi yang positif sebesar 0,370556 menunjukkan adanya hubungan positif antara profitabilitas (NPM) dan leverage (DAR) secara simultan terhadap agresivitas pajak (ETR) pada 21 perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi dengan presentase sumbangan pengaruh sebesar 37,06 persen. Berdasarkan hasil uji secara simultan (Uji F) bahwa variabel independen dalam penelitian ini, yaitu profitabilitas (*Net Profit Margin*) (X1) dan *leverage* (*Debt to Asset Ratio*) (X2) secara simultan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan melakukan pengujian statistik pada uji F dimana nilai signifikansi sebesar 0,000006 lebih kecil dari 0,05 atau $(0,000006 < 0,05)$ dan nilai dari ($F_{hitung} > F_{tabel}$) ($3,782961 > 3,55$).

Hal ini menunjukkan semakin tinggi nilai profitabilitas dan *leverage* maka semakin memungkinkan terjadinya tindakan agresivitas pajak dan sebaliknya jika semakin rendah nilai profitabilitas dan *leverage* maka tindakan agresivitas pajak perusahaan akan menurun. Hal tersebut artinya jika perusahaan memperoleh pendapatan yang besar akan mempengaruhi perusahaan dengan besarnya pendapatan

yang diperoleh dapat digunakan untuk menutup tingkat utang perusahaan sehingga laba dapat menurun dan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan.

Dalam penelitian ini terdapat 10 dari 21 sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi tahun 2013-2017 yang terindikasi melakukan agresivitas pajak, dan 11 perusahaan lainnya tidak terindikasi melakukan upaya agresivitas pajak. Perusahaan yang terindikasi melakukan upaya agresivitas pajak yaitu perusahaan CEKA, DLTA, MYOR, SKBM, SKLT, STTP, WIIM, KLBF, TSPC, dan TCID karena pada saat *Net Profit Margin* dan *Debt to Asset Ratio* perusahaan tinggi namun nilai ETR perusahaan tersebut berada dibawah 25 persen.

Penelitian ini sejalan dengan Gemilang (2017), Mayasari, dkk (2017) dan Melyana (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2013-2017. Dari hasil analisis data dari bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa variabel profitabilitas perusahaan memiliki hubungan negatif dengan agresivitas pajak perusahaan dan terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,0000 < 0,05$) dan nilai dari ($t_{hitung} > t_{tabel}$) ($4,516102 > 2,101$). Hal ini dikarenakan semakin besar profitabilitas dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan mengurangi nilai rasio *effective tax rate* yang nantinya akan mempengaruhi agresivitas pajak.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa variabel *leverage* perusahaan memiliki hubungan positif dengan agresivitas pajak perusahaan dan terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai signifikansi sebesar 0,0245 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,0245 < 0,05$) dan nilai dari ($t_{hitung} > t_{tabel}$) ($2,291228 > 2,101$). Hal ini dikarenakan semakin besar *leverage* yang diperoleh perusahaan maka perusahaan akan memanfaatkan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Oleh karena itu makin tinggi tarif bunga akan makin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut. Sehingga kemungkinan dengan sengajanya perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak maka dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. Jadi semakin tinggi *leverage*, maka akan semakin pula tinggi agresivitas pajak.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa koefisien regresi yang positif sebesar 0,370556 menunjukkan adanya hubungan positif antara profitabilitas (NPM) dan leverage (DAR) secara simultan terhadap agresivitas pajak (ETR) pada 21 perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi dengan presentase sumbangan pengaruh sebesar 37,06 persen. Variabel profitabilitas dan *leverage* secara simultan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan melakukan pengujian

statistik pada uji F dimana nilai signifikansi sebesar 0,000006 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,000006 < 0,05$) dan nilai dari ($F_{hitung} > F_{tabel}$) ($3,782961 > 3,55$). Hal ini menunjukkan semakin tinggi nilai profitabilitas dan *leverage* maka semakin memungkinkan terjadinya tindakan agresivitas pajak dan sebaliknya jika semakin rendah nilai profitabilitas dan *leverage* maka tindakan agresivitas pajak perusahaan akan menurun.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Karena masih adanya sejumlah variabel lain yang belum digunakan dan memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi yang terjadi didalam sebuah perusahaan. Maka penelitian selanjutnya diharapkan memasukkan variabel-variabel lain yang erat kaitannya dengan agresivitas pajak.
2. Karena dalam penelitian ini hanya dilakukan selama 5 tahun maka penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan sehingga memperoleh sampel yang lebih besar dan dapat menggambarkan hasil yang sesuai, penelitian selanjutnya disarankan untuk mencoba menggunakan proksi agresivitas pajak yang lain agar agresivitas pajak dapat dijelaskan dengan lebih baik.
3. Bagi regulator, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait peraturan pajak bagi badan usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyansah, Danis. (2014). *Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI selama Periode 2010-2012)*. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro Semarang.
- Ariefianto, Moch. Doddy. (2012). *Ekonometrika Esensi dan aplikasi dengan menggunakan EViews*. Jakarta : Erlangga.
- Arifin, J. (2017). *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Jakarta : Kelompok Gramedia.
- Damanik, Febry C. (2017). *Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan Dewan Komisaris Sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015*. Skripsi. Medan : Universitas Sumatra Utara.
- Fadli, Imam. (2016). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013)*. Pekanbaru : Universitas Riau. JOM Fekon, Vol.3 No.1 (Februari) 2016.
- Gemilang, Dewi Nawang. (2017). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2013-2015)*. Skripsi. Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Ghazali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Darmodar N. dan Dawn C. Porter. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2 Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harjito, D. Agus dan Martono. (2012). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Hermanto, Bambang dan Mulyo Agung. (2015). *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Hery. (2015). *Analisis Kinerja Manajemen*. Jakarta : Grasindo.
- Hutomo, YB. Sigit. (2009). *Pajak Penghasilan Konsep dan Aplikasi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta : ANDI.
- Melyana, Ana. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Otomotif, Komponen, dan Kabel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015*. Skripsi. Bogor : Universitas Pakuan.
- Mayangsari, Dessy. (2017). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013)*. Skripsi. Bogor : Universitas Pakuan.
- Mayasari, Putri., Rahmawati dan Efi Susanti. (2017). *Pengaruh Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2013-2016*. Bangkinang : STIE Bangkinang.
- Nugraha, Novia Bani. (2015). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di BEI selama Periode 2012-2013)*. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro Semarang.
- Pohan, Chairil Anwar. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanto, Agus. (2016). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, dan Kopersasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013*. Pekanbaru : Universitas Riau, JOM Fekon, Vol.3 No.1 (Februari) 2016.
- Santoso, Singgih. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Sriyana, Jaka. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta : Ekosiana.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmawati, Fitri dan Cyntia Rebecca. (2016). *Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2014*. Conference on Management and Behavioral Studies. Jakarta : Universitas Tarumanagara. 27 Oktober 2016. ISSN NO: 2541-3400, e-ISSN NO: 2541-2850.
- Susanti, Irawati. (2015). *Pengaruh Agresivitas Pajak dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013*. Skripsi. Depok : Universitas Indonesia.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. (2015). *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang : Empatdua Media.

Wahono, Sugeng. (2012). *Mengurus Pajak Itu Mudah*. Surabaya : Elex Media Komputindo.

Widarjono, Agus. (2013). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Ekonosia.

Winarno, Wing Wahyu. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan EViews*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.

nasional.kontan.co.id, 26 Maret 2013, 18:05 WIB

nasional.kontan.co.id, 13 Juni 2014, 09:26 WIB

www.sahamok.com

www.idx.co.id

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Populasi Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi

NO	KODE SAHAM	NAMA EMITEN	Tahun Listing	Kriteria			Sampel
				1	2	3	
1	AISA	PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK	1997	√	√	x	x
2	ALTO	PT TRI BANYAN TIRTA TBK	2012	√	√	x	x
3	AQUA	PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK	1990	x	x	x	x
4	CAMP	CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK	2017	√	x	x	x
5	CEKA	WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK, PT (D.H CAHAYA KALBAR TBK, PT)	1996	√	√	√	√
6	CLEO	SARIGUNA PRIMATIRTA TBK	2017	√	x	x	x
7	DAVO	DAVOMAS ABADI TBK, PT	1994	x	x	x	x
8	DLTA	DELTA DJAKARTA TBK, PT	1984	√	√	√	√
9	HOKI	BUYUNG POETRA SEMBADA TBK, PT	2017	√	x	x	x
10	ICBP	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK, PT	2010	√	√	√	√
11	INDF	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT	1994	√	√	√	√
12	MLBI	MULTI BINTANG INDONESIA TBK,PT	1994	√	x	x	x
13	MYOR	MAYORA INDAH TBK, PT	1990	√	√	√	√
14	PCAR	PRIMA CAKRAWALA ABADI TBK	2017	√	x	x	x
15	PSDN	PRASHIDA ANEKA NIAGA TBK, PT	1994	√	√	x	x
16	ROTI	NIPPON INDOSARI CORPORINDO TBK,PT	2010	√	√	√	√
17	SKBM	SEKAR BUMI TBK, PT	2012	√	√	√	√
18	SKLT	SEKAR LAUT TBK, PT	1993	√	√	√	√
19	STTP	SIANTAR TOP TBK, PT	1996	√	√	√	√
20	ULTJ	ULTRAJAYA MILK INDUSTRY AND TRANDING COMPANY TBK, PT	1990	√	√	√	√
21	GGRM	GUDANG GARAM TBK	1990	√	√	√	√
22	HMSP	HANDJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	1990	√	√	√	√
23	RMBA	BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA TBK	1990	√	√	x	x
24	WIIM	WISMILAK INTI MAKMUR TBK	2012	√	√	√	√
25	DVLA	DARYA VARIA LABORATORIA TBK	1994	√	√	√	√
26	INAF	INDOFARMA (PERSERO) TBK	2001	√	√	x	x
27	KAEF	KIMIA FARMA (PERSERO) TBK	2001	√	√	√	√
28	KLBF	KALBE FARMA TBK	1991	√	√	√	√

NO	KODE SAHAM	NAMA EMITEN	Tahun Listing	Kriteria			Sampel
				1	2	3	
29	MERK	MERCK INDONESIA TBK	1981	√	√	√	√
30	PYFA	PYRIDAM FARMA TBK	2001	√	√	√	√
31	SCPI	MERCK SHARP DOHME PHARMA TBK	1990	√	x	x	x
32	SIDO	INDUSTRI JAMU & FARMASI SIDO MUNCUL TBK	2013	√	x	x	x
33	SQBB	TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK (SAHAM BIASA)	1983	√	x	x	x
	SQBI	TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK (SAHAM PREFEREN)	1983	√	x	x	x
34	TSPC	TEMPO SCAN PASIFIC TBK	1994	√	√	√	√
35	ADES	AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK, PT (D.H ADES WATERS INDONESIA TBK,PT)	1994	√	x	x	x
36	KINO	KINO INDONESIA TBK	2015	√	x	x	x
37	MBTO	MARTINA BERTO TBK	2011	√	√	x	x
38	MRAT	MUSTIKA RATU TBK	1995	√	√	x	x
39	TCID	MANDOM INDONESIA TBK	1993	√	√	√	√
40	UNVR	UNILEVER INDONESIA TBK	1982	√	√	√	√
41	CINT	CHITOSE INTERNATIONAL TBK, PT	2014	√	x	x	x
42	KICI	KEDAUNG INDAH CAN TBK, PT	1993	√	√	x	x
43	LMPI	LANGGENG MAKMUR INDUSTRY TBK, PT	1994	√	√	x	x
44	WOOD	INTEGRA INDOCABINET TBK, PT	2017	√	x	x	x

Lampiran 2

Daftar Sampel Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi

NO	KODE SAHAM	NAMA EMITEN	Tanggal Listing di BEI
1	CEKA	WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK, PT (D.H CAHAYA KALBAR TBK, PT)	09 Juli 1996
2	DLTA	DELTA DJAKARTA TBK, PT	12 Februari 1984
3	ICBP	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK, PT	07 Oktober 2010
4	INDF	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT	14 Juli 1994
5	MYOR	MAYORA INDAH TBK, PT	04 Juli 1990
6	ROTI	NIPPON INDOSARI CORPORINDO TBK,PT	28 Juni 2010
7	SKBM	SEKAR BUMI TBK, PT	28 September 2012
8	SKLT	SEKAR LAUT TBK, PT	08 September 1993
9	STTP	SIANTAR TOP TBK, PT	16 Desember 1996
10	ULTJ	ULTRAJAYA MILK INDUSTRY AND TRANDING COMPANY TBK, PT	02 Juli 1990
11	GGRM	GUDANG GARAM TBK	27 Agustus 1990
12	HMSP	HANDJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	15 Agustus 1990
13	WIIM	WISMILAK INTI MAKMUR TBK	18 Desember 2012
14	DVLA	DARYA VARIA LABORATORIA TBK	11 November 1994
15	KAEF	KIMIA FARMA (PERSERO) TBK	04 Juli 2001
16	KLBF	KALBE FARMA TBK	30 Juli 1991
17	MERK	MERCK INDONESIA TBK	23 Juli 1981
18	PYFA	PYRIDAM FARMA TBK	16 Oktober 2001
19	TSPC	TEMPO SCAN PASIFIC TBK	17 Januari 1994
20	TCID	MANDOM INDONESIA TBK	23 September 1993
21	UNVR	UNILEVER INDONESIA TBK	11 Januari 1982

Lampiran 3
Hasil Perhitungan

PERHITUNGAN EFFECTIVE TAX RATE			
WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK, PT (D.H CAHAYA KALBAR TBK, PT)			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	21,484,183,371	86,553,141,929	0.248
2014	15,865,132,224	56,866,547,178	0.279
2015	35,721,906,910	142,271,353,890	0.251
2016	36,130,823,829	285,827,837,455	0.126
2017	35,775,052,527	143,195,939,366	0.250
DELTA DJAKARTA TBK, PT			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	87,897,926,000	358,395,988,000	0.245
2014	91,587,361,000	380,086,736,000	0.241
2015	58,152,543,000	250,197,742,000	0.232
2016	72,538,386,000	327,047,654,000	0.222
2017	89,240,218,000	369,012,853,000	0.242
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK, PT			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	733,699,000,000	2,966,990,000,000	0.247
2014	871,208,000,000	3,445,380,000,000	0.253
2015	1,086,486,000,000	4,009,634,000,000	0.271
2016	1,357,953,000,000	4,989,254,000,000	0.272
2017	1,663,388,000,000	5,206,561,000,000	0.319
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	1,252,072,000,000	4,666,958,000,000	0.268
2014	1,855,939,000,000	6,340,185,000,000	0.293
2015	1,730,371,000,000	4,962,084,000,000	0.349
2016	2,532,747,000,000	7,385,228,000,000	0.343
2017	2,513,491,000,000	7,658,554,000,000	0.328
MAYORA INDAH TBK, PT			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	297,654,557,305	1,356,073,496,557	0.219
2014	119,649,017,130	529,267,706,614	0.226
2015	390,261,637,241	1,640,494,765,801	0.238
2016	457,007,141,573	1,845,683,269,238	0.248
2017	555,930,772,581	2,186,884,603,474	0.254
NIPPON INDOSARI CORPORINDO TBK,PT			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	52,789,633,241	210,804,904,162	0.250

2014	64,208,995,297	252,857,341,173	0.254
2015	107,712,914,648	378,251,615,088	0.285
2016	89,639,472,867	369,416,841,698	0.243
2017	50,783,313,391	186,147,334,530	0.273
SEKAR BUMI TBK, PT			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	20,038,059,647	78,305,045,915	0.256
2014	20,809,209,078	110,903,572,672	0.188
2015	13,479,285,258	53,629,853,879	0.251
2016	8,264,494,258	30,809,950,308	0.268
2017	5,880,557,363	31,761,022,154	0.185
SEKAR LAUT TBK, PT			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	5,157,771,350	16,597,785,538	0.311
2014	7,063,322,474	23,544,037,458	0.300
2015	7,309,446,374	27,376,238,223	0.267
2016	4,520,085,462	25,166,206,536	0.180
2017	4,399,850,008	27,370,565,356	0.161
SIANTAR TOP TBK, PT			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	28,362,006,717	142,799,075,520	0.199
2014	44,342,168,784	167,977,695,749	0.264
2015	46,300,197,602	232,005,398,773	0.200
2016	43,569,590,674	217,746,308,540	0.200
2017	72,521,739,769	288,545,819,603	0.251
ULTRAJAYA MILK INDUSTRY AND TRANDING COMPANY TBK, PT			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	111,592,767,209	436,720,187,873	0.256
2014	91,896,185,643	374,957,616,094	0.245
2015	177,575,035,200	700,675,250,229	0.253
2016	222,657,146,910	932,482,782,652	0.239
2017	314,550,000,000	1,026,231,000,000	0.307
GUDANG GARAM TBK			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	1,552,272,000,000	5,936,204,000,000	0.261
2014	1,810,552,000,000	7,205,845,000,000	0.251
2015	2,182,441,000,000	8,635,275,000,000	0.253
2016	2,258,454,000,000	8,931,136,000,000	0.253
2017	2,681,165,000,000	10,436,512,000,000	0.257
HANDJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	3,691,224,000,000	14,509,710,000,000	0.254
2014	3,537,216,000,000	13,718,299,000,000	0.258

2015	3,569,336,000,000	13,932,644,000,000	0.256
2016	4,249,218,000,000	17,011,447,000,000	0.250
2017	4,224,272,000,000	16,894,806,000,000	0.250
WISMILAK INTI MAKMUR TBK			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	42,797,081,717	175,119,289,578	0.244
2014	37,359,691,059	150,033,454,319	0.249
2015	46,881,830,192	177,962,941,779	0.263
2016	30,372,690,384	136,662,997,252	0.222
2017	13,901,517,361	54,491,308,212	0.255
DARYA VARIA LABORATORIA TBK			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	49,960,304,000	175,756,777,000	0.284
2014	25,159,730,000	106,757,491,000	0.236
2015	36,543,278,000	144,437,708,000	0.253
2016	62,333,656,000	214,417,056,000	0.291
2017	63,898,628,000	226,147,921,000	0.283
KIMIA FARMA (PERSERO) TBK			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	68,483,102,322	284,125,432,299	0.241
2014	86,181,636,916	344,017,652,213	0.251
2015	85,162,555,115	338,135,061,189	0.252
2016	111,427,977,007	383,025,924,670	0.291
2017	118,001,844,961	449,709,762,422	0.262
KALBE FARMA TBK			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	602,070,267,545	2,572,522,717,231	0.234
2014	642,915,814,984	2,765,593,462,800	0.232
2015	663,186,962,586	2,720,881,244,459	0.244
2016	740,303,526,679	3,091,188,460,230	0.239
2017	787,935,315,388	3,241,186,725,992	0.243
MERCK INDONESIA TBK			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	59,262,982,000	234,707,739,000	0.252
2014	54,907,935,000	205,958,418,000	0.267
2015	51,395,379,000	193,940,841,000	0.265
2016	61,073,314,000	214,916,161,000	0.284
2017	61,107,348,000	205,784,642,000	0.297
PYRIDAM FARMA TBK			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	2,304,128,607	8,499,928,945	0.271
2014	1,550,165,979	4,211,187,980	0.368
2015	1,467,826,630	4,554,931,095	0.322

2016	1,907,090,128	7,053,407,169	0.270
2017	2,471,878,605	9,599,280,773	0.258
TEMPO SCAN PASIFIC TBK			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	191,400,294,291	829,935,403,086	0.231
2014	152,515,117,693	738,305,933,705	0.207
2015	177,892,281,060	707,110,932,867	0.252
2016	173,464,664,107	718,958,200,369	0.241
2017	186,750,680,877	774,090,262,873	0.241
MANDOM INDONESIA TBK			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	58,149,236,079	218,297,701,912	0.266
2014	65,114,435,511	239,428,829,612	0.272
2015	38,647,669,480	583,121,947,494	0.066
2016	59,416,261,296	221,475,857,643	0.268
2017	63,956,663,719	243,083,045,787	0.263
UNILEVER INDONESIA TBK			
TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2013	1,806,183,000,000	7,158,808,000,000	0.252
2014	2,000,932,000,000	7,927,652,000,000	0.252
2015	1,977,685,000,000	7,829,490,000,000	0.253
2016	2,181,213,000,000	8,571,885,000,000	0.254
2017	2,367,099,000,000	9,371,661,000,000	0.253

PERHITUNGAN PROFITABILITAS			
WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK, PT (D.H CAHAYA KALBAR TBK, PT)			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	65,068,958,558	2,531,881,182,546	0.026
2014	41,001,414,954	3,701,868,790,192	0.011
2015	106,549,446,980	3,485,733,830,354	0.031
2016	249,697,013,626	4,115,541,761,173	0.061
2017	107,420,886,839	4,257,738,486,908	0.025
DELTA DJAKARTA TBK, PT			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	270,498,062,000	867,066,542,000	0.312
2014	288,499,375,000	879,253,383,000	0.328
2015	192,045,199,000	699,506,819,000	0.275
2016	254,509,268,000	774,968,268,000	0.328
2017	279,772,635,000	777,308,328,000	0.360
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK, PT			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	2,235,040,000,000	25,094,681,000,000	0.089
2014	2,574,172,000,000	30,022,463,000,000	0.086
2015	2,923,148,000,000	31,741,094,000,000	0.092
2016	3,631,301,000,000	34,466,069,000,000	0.105
2017	3,543,173,000,000	35,606,593,000,000	0.100
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	3,416,635,000,000	57,731,998,000,000	0.059
2014	5,229,489,000,000	63,594,452,000,000	0.082
2015	3,709,501,000,000	64,061,947,000,000	0.058
2016	5,266,906,000,000	66,750,317,000,000	0.079
2017	5,145,063,000,000	70,186,618,000,000	0.073
MAYORA INDAH TBK, PT			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	1,058,418,939,252	12,017,837,133,337	0.088
2014	409,618,689,484	14,169,088,278,238	0.029
2015	1,250,233,128,560	14,818,730,635,847	0.084
2016	1,388,676,127,665	18,349,959,898,358	0.076
2017	1,630,953,830,893	20,816,673,946,473	0.078
NIPPON INDOSARI CORPORINDO TBK,PT			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	158,015,270,921	1,505,519,937,691	0.105
2014	188,648,345,876	1,880,262,901,697	0.100
2015	270,538,700,440	2,174,501,712,899	0.124
2016	279,777,368,831	2,521,920,968,213	0.111
2017	135,364,021,139	2,491,100,179,560	0.054

SEKAR BUMI TBK, PT			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	58,266,986,268	1,296,618,257,503	0.045
2014	90,094,363,594	1,480,764,903,724	0.061
2015	40,150,568,621	1,362,245,580,664	0.029
2016	22,545,456,050	1,501,115,928,446	0.015
2017	25,880,464,791	1,841,487,199,828	0.014
SEKAR LAUT TBK, PT			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	11,440,014,188	567,048,547,543	0.020
2014	16,480,714,984	681,419,524,161	0.024
2015	20,066,791,849	745,107,731,208	0.027
2016	20,646,121,074	833,850,372,883	0.025
2017	22,970,715,348	914,188,759,779	0.025
SIANTAR TOP TBK, PT			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	114,437,068,803	1,694,935,468,814	0.068
2014	123,635,526,965	2,170,464,194,350	0.057
2015	185,705,201,171	2,544,277,844,656	0.073
2016	174,176,717,866	2,629,107,367,897	0.066
2017	216,024,079,834	2,825,409,180,889	0.076
ULTRAJAYA MILK INDUSTRY AND TRANDING COMPANY TBK, PT			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	325,127,420,664	3,460,231,249,075	0.094
2014	283,061,430,451	3,916,789,366,423	0.072
2015	523,100,215,029	4,393,932,684,171	0.119
2016	709,825,635,742	4,685,987,917,355	0.151
2017	711,681,000,000	4,879,559,000,000	0.146
GUDANG GARAM TBK			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	4,383,932,000,000	55,436,954,000,000	0.079
2014	5,395,293,000,000	65,185,850,000,000	0.083
2015	6,452,834,000,000	70,365,573,000,000	0.092
2016	6,672,682,000,000	76,274,147,000,000	0.087
2017	7,755,347,000,000	83,305,925,000,000	0.093
HANDJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	10,818,486,000,000	75,025,207,000,000	0.144
2014	10,181,083,000,000	80,690,139,000,000	0.126
2015	10,363,308,000,000	89,069,306,000,000	0.116
2016	12,762,229,000,000	95,466,657,000,000	0.134
2017	12,670,534,000,000	99,091,484,000,000	0.128
WISMILAK INTI MAKMUR TBK			

TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	132,322,207,861	1,588,022,200,150	0.083
2014	112,673,763,260	1,661,533,200,316	0.068
2015	131,081,111,587	1,839,419,574,956	0.071
2016	106,290,306,868	1,685,795,530,617	0.063
2017	40,589,790,851	1,476,427,090,781	0.027
DARYA VARIA LABORATORIA TBK			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	125,796,473,000	1,101,684,170,000	0.114
2014	81,597,761,000	1,103,821,775,000	0.074
2015	107,894,430,000	1,306,098,136,000	0.083
2016	152,083,400,000	1,451,356,680,000	0.105
2017	162,249,293,000	1,575,647,308,000	0.103
KIMIA FARMA (PERSERO) TBK			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	215,642,329,977	4,348,073,988,385	0.050
2014	257,836,015,297	4,521,024,379,760	0.057
2015	252,972,506,074	4,860,371,483,524	0.052
2016	271,597,947,663	5,811,502,656,431	0.047
2017	331,707,917,461	6,127,479,369,403	0.054
KALBE FARMA TBK			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	1,970,452,449,686	16,002,131,057,048	0.123
2014	2,122,677,647,816	17,368,532,547,558	0.122
2015	2,057,694,281,873	17,887,464,223,321	0.115
2016	2,350,884,933,551	19,374,230,957,505	0.121
2017	2,453,251,410,604	20,182,120,166,616	0.122
MERCK INDONESIA TBK			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	175,444,757,000	1,193,952,302,000	0.147
2014	182,147,224,000	863,207,535,000	0.211
2015	142,545,462,000	983,446,471,000	0.145
2016	153,842,847,000	1,034,806,890,000	0.149
2017	144,677,294,000	1,156,648,155,000	0.125
PYRIDAM FARMA TBK			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	6,195,800,338	192,555,731,180	0.032
2014	2,661,022,001	222,302,407,528	0.012
2015	3,087,104,465	217,843,921,422	0.014
2016	5,146,317,041	216,951,583,953	0.024
2017	7,127,402,168	223,002,490,278	0.032
TEMPO SCAN PASIFIC TBK			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM

2013	638,535,108,795	6,854,889,233,121	0.093
2014	585,790,816,012	7,512,115,037,587	0.078
2015	529,218,651,807	8,181,481,867,179	0.065
2016	545,493,536,262	9,138,238,993,842	0.060
2017	557,339,581,996	9,565,462,045,199	0.058
MANDOM INDONESIA TBK			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	160,148,465,833	2,027,899,402,527	0.079
2014	174,314,394,101	2,308,203,551,971	0.076
2015	544,474,278,014	2,314,889,854,074	0.235
2016	162,059,596,347	2,526,776,164,168	0.064
2017	179,126,382,068	2,706,394,847,919	0.066
UNILEVER INDONESIA TBK			
TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	PENJUALAN BERSIH	NPM
2013	5,352,625,000,000	30,757,435,000,000	0.174
2014	5,926,720,000,000	34,511,534,000,000	0.172
2015	5,851,805,000,000	36,484,030,000,000	0.160
2016	6,390,672,000,000	40,053,732,000,000	0.160
2017	7,004,562,000,000	41,204,510,000,000	0.170

PERHITUNGAN LEVERAGE			
WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK, PT (D.H CAHAYA KALBAR TBK, PT)			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	541,325,365,829	1,069,627,299,747	0.506
2014	746,598,865,219	1,284,150,037,341	0.581
2015	845,932,695,663	1,485,826,210,015	0.569
2016	538,044,038,690	1,425,964,152,418	0.377
2017	489,592,257,434	1,382,636,444,501	0.354
DELTA DJAKARTA TBK, PT			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	190,482,809,000	867,040,802,000	0.220
2014	237,047,063,000	997,443,167,000	0.238
2015	188,700,435,000	1,038,321,916,000	0.182
2016	185,422,642,000	1,197,796,650,000	0.155
2017	196,197,372,000	1,340,842,765,000	0.146
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK, PT			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	8,001,739,000,000	21,267,470,000,000	0.376
2014	10,445,187,000,000	25,029,488,000,000	0.417
2015	10,173,713,000,000	26,560,624,000,000	0.383
2016	10,401,125,000,000	28,901,948,000,000	0.360
2017	11,295,184,000,000	31,619,514,000,000	0.357
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	39,719,660,000,000	78,092,789,000,000	0.509
2014	45,803,053,000,000	86,077,251,000,000	0.532
2015	48,709,933,000,000	91,831,526,000,000	0.530
2016	38,233,092,000,000	82,174,515,000,000	0.465
2017	41,182,764,000,000	87,939,488,000,000	0.468
MAYORA INDAH TBK, PT			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	5,771,077,430,823	9,709,838,250,473	0.594
2014	6,220,960,735,713	10,297,997,020,540	0.604
2015	6,148,255,759,034	11,342,715,686,221	0.542
2016	6,657,165,872,077	12,922,421,859,142	0.515
2017	7,561,503,434,179	14,915,849,800,251	0.507
NIPPON INDOSARI CORPORINDO TBK,PT			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	1,035,351,397,437	1,822,689,047,108	0.568
2014	1,189,311,196,709	2,142,894,276,216	0.555
2015	1,517,788,685,162	2,706,323,637,034	0.561
2016	1,476,889,086,692	2,919,640,858,718	0.506
2017	1,739,467,993,982	4,559,573,709,411	0.381

SEKAR BUMI TBK, PT			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	296,528,343,161	497,652,557,672	0.596
2014	345,361,448,340	652,976,510,619	0.529
2015	420,396,809,051	764,484,248,710	0.550
2016	633,267,725,358	1,001,657,012,004	0.632
2017	599,790,014,646	1,623,027,475,045	0.370
SEKAR LAUT TBK, PT			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	162,339,135,063	301,989,488,699	0.538
2014	178,206,785,017	331,574,891,637	0.537
2015	225,066,080,248	377,110,748,359	0.597
2016	272,088,644,079	568,239,939,951	0.479
2017	328,714,435,982	636,284,210,210	0.517
SIANTAR TOP TBK, PT			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	775,930,985,779	1,470,059,394,892	0.528
2014	884,693,224,635	1,700,204,093,895	0.520
2015	910,758,598,913	1,919,568,037,170	0.474
2016	1,167,899,357,271	2,336,411,494,941	0.500
2017	957,660,374,836	2,342,432,443,196	0.409
ULTRAJAYA MILK INDUSTRY AND TRANDING COMPANY TBK, PT			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	796,474,448,056	2,811,620,982,142	0.283
2014	644,827,122,017	2,918,133,278,435	0.221
2015	742,490,216,326	3,539,995,910,248	0.210
2016	749,966,146,582	4,239,199,641,365	0.177
2017	978,185,000,000	5,186,940,000,000	0.189
GUDANG GARAM TBK			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	21,353,980,000,000	50,770,251,000,000	0.421
2014	24,991,880,000,000	58,220,600,000,000	0.429
2015	25,497,504,000,000	63,505,413,000,000	0.402
2016	23,387,406,000,000	62,951,634,000,000	0.372
2017	24,572,266,000,000	66,759,930,000,000	0.368
HANDJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	13,249,559,000,000	27,404,594,000,000	0.483
2014	14,882,516,000,000	28,380,630,000,000	0.524
2015	5,994,664,000,000	38,010,724,000,000	0.158
2016	8,333,263,000,000	42,508,277,000,000	0.196
2017	9,028,078,000,000	43,141,063,000,000	0.209
WISMILAK INTI MAKMUR TBK			

TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	447,651,956,356	1,229,011,260,881	0.364
2014	488,154,387,359	1,334,544,790,387	0.366
2015	398,991,064,485	1,342,700,045,391	0.297
2016	362,540,740,471	1,353,634,132,275	0.268
2017	247,620,731,930	1,225,712,093,041	0.202
DARYA VARIA LABORATORIA TBK			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	275,351,336,000	1,190,054,288,000	0.231
2014	293,785,055,000	1,241,239,780,000	0.237
2015	402,760,903,000	1,376,278,237,000	0.293
2016	451,785,946,000	1,531,365,558,000	0.295
2017	524,586,078,000	1,640,886,147,000	0.320
KIMIA FARMA (PERSERO) TBK			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	847,584,859,909	2,471,939,548,890	0.343
2014	1,291,699,778,059	3,012,778,637,568	0.429
2015	1,374,127,253,841	3,236,224,076,311	0.425
2016	2,341,155,131,870	4,612,562,541,064	0.508
2017	3,523,628,217,406	6,096,148,972,533	0.578
KALBE FARMA TBK			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	2,815,103,309,451	11,315,061,275,026	0.249
2014	2,675,166,377,592	12,439,267,396,015	0.215
2015	2,758,131,396,170	13,696,417,381,439	0.201
2016	2,762,162,069,572	15,226,009,210,657	0.181
2017	2,722,207,633,646	16,616,239,416,335	0.164
MERCK INDONESIA TBK			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	184,727,678,000	696,946,318,000	0.265
2014	166,811,511,000	711,055,830,000	0.235
2015	168,103,536,000	641,646,818,000	0.262
2016	161,262,425,000	743,934,894,000	0.217
2017	231,569,103,000	847,006,544,000	0.273
PYRIDAM FARMA TBK			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	81,217,648,190	175,118,921,406	0.464
2014	75,460,789,155	172,557,400,461	0.437
2015	58,729,478,032	159,951,537,229	0.367
2016	61,554,005,181	167,062,795,608	0.368
2017	50,707,930,330	159,563,931,041	0.318
TEMPO SCAN PASIFIC TBK			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR

2013	1,545,006,061,565	5,407,957,915,805	0.286
2014	1,527,428,955,386	5,609,556,653,195	0.272
2015	1,947,588,124,083	6,284,729,099,203	0.310
2016	1,950,534,206,746	6,585,807,349,438	0.296
2017	2,352,891,899,876	7,434,900,309,021	0.316
MANDOM INDONESIA TBK			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	282,961,770,795	1,465,952,460,752	0.193
2014	569,730,901,368	1,853,235,343,636	0.307
2015	367,225,370,670	2,082,096,848,703	0.176
2016	401,942,530,776	2,185,101,038,101	0.184
2017	503,480,853,006	2,361,807,189,430	0.213
UNILEVER INDONESIA TBK			
TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	DAR
2013	9,093,518,000,000	13,348,188,000,000	0.681
2014	9,534,156,000,000	14,280,670,000,000	0.668
2015	10,902,585,000,000	15,729,945,000,000	0.693
2016	12,041,437,000,000	16,745,695,000,000	0.719
2017	13,733,025,000,000	18,906,413,000,000	0.726